

LAPORAN KINERJA

DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

TA. 2014



Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam lingkup Satuan/Unit Kerja tertentu. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian disusun berdasarkan penugasan Menteri Pertanian yang diberikan kepada Pimpinan Unit Eselon I sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK). Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Laporan Kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dan kebijaksanaan yang dikaitkan dengan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra).

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan ketentuan tersebut, secara singkat Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 ini memuat hal-hal menyangkut pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang penting.

Disadari bahwa Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 masih perlu penyempurnaan. Untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2015

Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,



Dr. K. Sumarto Gatot Irianto, MS. DAA
NIP. 19601024 198703 1001

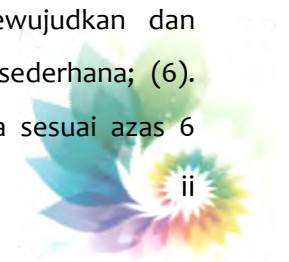


IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta memenuhi instruksi Presiden RI No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSP. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Ditjen PSP.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Menteri Pertanian merupakan implementasi dari renstra Ditjen PSP tahun 2011-2014. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu mendorong upaya penyediaan infrastruktur menyangkut aspek perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan, pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian yang mendukung pembangunan subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh 6 unit kerjas eselon II yaitu Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida dan Sekretariat Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana pertanian 2011-2014, Ditjen PSP menetapkan visi mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian, untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan pula misi sebagai berikut : (1). Mendorong partisipasi *stake holder* dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan; (2). Mendayagunakan lahan dan air untuk kegiatan pertanian yang berkelanjutan; (3). Menyelenggarakan manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas; (4). Menyusun kebijakan pengembangan perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan; (5). Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana; (6). Memfasilitasi penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai azas 6

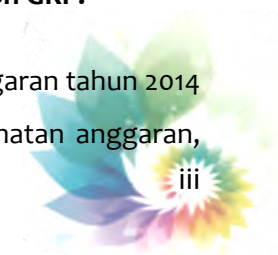


(enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga); (7). Meningkatkan pengawasan atas penyediaan, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida; (8). Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida; (9). Mendorong peran serta masyarakat dan *stakeholder* terkait dalam penyediaan dan pengawasan pupuk dan pestisida; (10). Menyelenggarakan pengembangan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian; (11). Memberikan pelayanan prima dalam bidang perencanaan, administrasi dan manajemen pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

Pada tahun 2014, sesuai dengan penetapan kinerja Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Menteri Pertanian, telah ditetapkan 1 sasaran strategis yaitu meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. Pencapaian sasaran akan terukur melalui capaian target indikator kinerja utama yaitu jumlah penambahan produksi padi sebesar **5.740.609 Ton GKP**.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian sasaran indikator kinerja utama yaitu Jumlah penambahan produksi padi sebesar **5.740.609 Ton GKP** terealisasi **5.509.493 Ton GKP (95.97%) dan disimpulkan “Berhasil”**. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan dan kontribusi kegiatan: 1). Pengembangan jaringan dan optimasi air seluas 443.836 Ha memberikan kontribusi 679.069 ton GKP, 2). Pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air sebanyak 498 unit (29.880 Ha) memberikan kontribusi 45.716 ton GKP, 3). Perluasan sawah 2013 (carry over) seluas 39.800 Ha dan perluasan sawah 2014 seluas 25.597 Ha memberikan kontribusi masing-masing sebesar 91.540 dan 58.873 ton GKP, 4). Pengembangan Optimasi Lahan Pertanian untuk komoditas padi seluas 122.485 Ha memberikan kontribusi 471.567 ton GKP, 5). Pengembangan Metode SRI seluas 161.719 Ha memberikan kontribusi 210.235 ton GKP, 6). Penyaluran pupuk urea bersubsidi untuk tanaman padi sejumlah 2.167.055 ton (10.835.273 Ha) memberikan kontribusi 3.792.346 ton GKP, 7). Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan untuk 1.713 Gapoktan (22.878 Ha) memberikan kontribusi 160.147 ton GKP. Sementara **itu jika dibandingkan dengan target renstra 2011-2014, target capaian penambahan produksi padi adalah sebesar 25.695.221 Ton GKP dengan rata-rata penambahan pertahun sebesar 6.423.805 Ton GKP, sedangkan sampai dengan TA. 2014 telah tercapai kontribusi sebesar 24.053.747 Ton GKP (93,61%) dengan rata-rata penambahan pertahun sebesar 6.013.437 Ton GKP.**

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapat dukungan anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 3.195.251.400.000,00. Pada Bulan Juni 2014 mengalami penghematan anggaran,



sehingga dukungan anggaran menjadi Rp. 2.715.885.667.000,00. Pada Bulan Desember 2014 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mendapatkan alokasi anggaran tambahan melalui dana contingencies sebesar Rp. 578.145.076.000,00, sehingga alokasi anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2014 menjadi sebesar **Rp. 3.294.030.743.000,00**. Anggaran tersebut terbagi atas Dana Tugas Pembantuan sebesar **Rp. 2.388.791.543.000,00**, Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. **69.929.730.000,00** dan dana satker pusat sebesar **Rp. 835.309.470.000,00**.

Secara total sampai dengan 31 Desember 2014, realisasi penyerapan anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebesar **Rp. 2.906.498.744.446,00** dari target anggaran **Rp. 3.294.030.743.000,00** atau sebesar **88,24%**.

Secara umum pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pertanian selama periode 2011-2014 masih ditemui kendala/hambatan meliputi aspek administrasi dan teknis pelaksanaan di lapangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah ditempuh upaya dan tindakan sebagai berikut : (1). Percepatan pelaksanaan kegiatan setelah terjadi proses penghematan dengan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan yang intensif, (2). Meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk sinergitas pelaksanaan kegiatan, (3). Meningkatkan sistim monitoring, (4). Melakukan pembinaan dengan lebih menekankan terhadap pemahaman RUKK / RDKK, (5). Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan Penerbitan Peraturan Bupati/Walikota, (6). Mengoptimalkan sistem pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini, (7). Mendorong pemerintah daerah agar menaruh perhatian serius terhadap pengembangan kawasan dan menyusun perencanaan detil dalam wujud *road map* yang dijadikan acuan dalam perencanaan tahunan nantinya, (8). Dalam pembinaan ke daerah menekankan agar identifikasi calon petani dan calon lokasi dapat dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga proses penyelesaian administrasi kegiatan dapat dipercepat, (9). Meningkatkan pembinaan untuk pelaksanaan kegiatan teknis sesuai pedoman yang telah ditentukan dan RUKK yang telah dibuat. Apabila ada perubahan, agar dapat segera merevisi RUKK, (10). Meningkatkan persiapan antisipatif terhadap pengaruh iklim dalam pelaksanaan kegiatan, dengan mengatur rencana pelaksanaan seefektif mungkin.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi	2
1.3. Organisasi	2
1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia.....	6
1.5. Dukungan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	6
II. PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1. Rencana Strategis Tahun 2011 – 2014	7
2.1.1. Visi	7
2.1.2. Misi	7
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	8
2.1.4. Arah Kebijakan	10
2.1.5. Rencana Aksi.....	13
2.1.6. Program dan Kegiatan	13
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2014	14
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2014.....	16



2.3.1.	Meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya	
	Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana	17
2.3.1.1.	Jumlah Penambahan Produksi Padi.....	18
2.3.1.2.	Dukungan dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas	
	Pertanian.....	20
III.	AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1.	Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.1.1	Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran.....	22
3.1.2	Pencapaian Sasaran Strategis Ditjen PSP Tahun 2014	22
3.1.3	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Ditjen PSP Tahun 2014	23
3.1.3.1	Meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya	
	Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana	
	Pertanian	23
3.1.3.2	Jumlah penambahan produksi padi.....	25
3.1.3.3	Dukungan dalam upaya meningkatkan produktivitas	
	pertanian	36
3.1.3.4	Dukungan manajemen dalam pelaksanaan kegiatan prasarana	
	Dan sarana pertanian.....	42
3.2.	Realisasi Anggaran	43
3.3.	Hambatan dan Kendala	46
3.4.	Upaya dan Tindak Lanjut.....	47
IV.	PENUTUP	49



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL	Halaman
Tabel 1 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ditjen PSP TA. 2014	14
Tabel 2 : Penetapan Kinerja (PK) Ditjen PSP TA. 2014	17
Tabel 3 : Kegiatan Utama pada Indikator Kinerja Utama Penambahan Produksi Padi Tahun 2014	17
Tabel 4 : Kegiatan Pendukung dalam Peningkatan Produktivitas Pertanian Tahun 2014	21
Tabel 5 : Capaian indikator Kinerja Utama Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014	22
Tabel 6 : Capaian Indikator Kinerja Utama melalui Capaian Outcome Kegiatan Utama PSP TA.2014.....	23
Tabel 7 : Perbandingan Capaian Kinerja TA.2013 dan TA. 2014	24
Tabel 8 : Capaian Kegiatan Pendukung dalam Peningkatan Produktivitas Pertanian (Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) Tahun 2014	36
Tabel 9 : Capaian Kegiatan Pendukung dalam Peningkatan Produktivitas Pertanian (Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) Terhadap Target Renstra	41
Tabel 10 : Capaian Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya...	42
Tabel 11 : Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan melalui Dana Kontingensi Tahun 2014	43
Tabel 12 : Daftar pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen PSP	44
Tabel 13 : Daftar pagu dan Realisasi Anggaran per Eselon II	44
Tabel 14 : Daftar dan Realisasi Anggaran Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian..	45



DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR	Halaman
Gambar 1 : Capaian Penambahan Produksi Padi Tahun 2011 - 2014	24
Gambar 2 : Kontribusi Kegiatan Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air Tahun 2011-2014	26
Gambar 3 : Kontribusi Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air Tahun 2011-2014	28
Gambar 4 : Kontribusi Kegiatan Perluasan Sawah Tahun 2011 - 2014.....	29
Gambar 5 : Kontribusi Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Tahun 2011-2014	31
Gambar 6 : Kontribusi Kegiatan Pengembangan Metode SRI Tahun 2011 - 2014	32
Gambar 7 : Kontribusi Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2011 – 2014	34
Gambar 8 : Kontribusi Kegiatan Pengembangan PUAP Tahun 2011 – 2014	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :	Struktur Organisasi Ditjen PSP Tahun 2014.....	52
Lampiran 2 :	Jumlah Pegawai Ditjen PSP Tahun 2014	53
Lampiran 3 :	Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama Ditjen PSP Tahun 2014	54
Lampiran 4 :	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ditjen PSP Tahun 2014	56
Lampiran 5 :	Penetapan Kinerja Ditjen PSP Tahun 2014	57
Lampiran 6 :	Target Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2011 – 2014 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.....	58



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian merupakan bagian integral yang mendukung pembangunan pertanian nasional. Permasalahan utama dalam pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian saat ini adalah penurunan kondisi sarana dan prasarana pertanian yang existing terutama menyangkut aspek kuantitas dan kualitas serta terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian peningkatan produksi pertanian. Kondisi ini menjadi dorongan dan tekad pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspek pengelolaan sarana dan prasarana pertanian.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 telah menetapkan unit organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang secara spesifik menangani prasarana dan sarana pertanian. Tugas pokok dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang utama adalah mendorong upaya penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan, pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian untuk mendukung pembangunan subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang dilaksanakan oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian saat ini merupakan pelaksanaan tahun kelima dalam rencana pembangunan jangka menengah 2010-2014. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan juga memenuhi instruksi Presiden RI No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PSP. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Menteri Pertanian.



1.2 Kedudukan Tugas, dan Fungsi

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai **tugas** “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian”. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan **fungsi** : (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian. (3) Penyusunan norma standar, pedoman dan kriteria di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian (4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian. (5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh 6 (enam) Unit Kerja Eselon II , yaitu :

1. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
2. Direktorat Pengelolaan Air Irigasi
3. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
4. Direktorat Pembiayaan Pertanian
5. Direktorat Pupuk dan Pestisida
6. Sekretariat Direktorat Jenderal.

Masing-masing Unit Kerja Direktorat didukung oleh 3 (tiga) sampai 5 (lima) unit Eselon III dan 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) unit Eselon IV. Sedangkan Sekretariat Direktorat Jenderal didukung oleh 4 (empat) unit Eselon III dan 12 (dua belas) unit Eselon IV.

1.3 Susunan Organisasi dan Tata kerja

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia dengan susunan organisasi yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, 5 unit Direktorat, 24 Unit kerja Eselon III dan 57 Unit kerja Eselon IV. Susunan organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dalam **lampiran 1**.

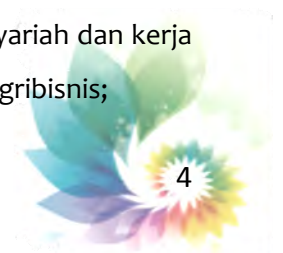


Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

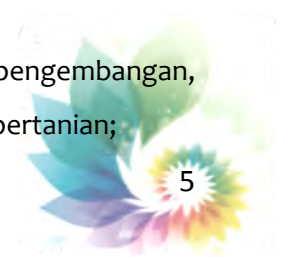
- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a) Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - c) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
 - d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- 2) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan dan pengelolaan lahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan menyelenggarakan fungsi :
 - a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
 - b) pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
 - c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;



- d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; dan
 - e) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.
- 3) Direktorat Pengelolaan Air Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan air irigasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengelolaan Air Irigasi menyelenggarakan fungsi :
- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan dan optimasi air, dan iklim, konservasi air dan lingkungan hidup, serta kelembagaan pengelolaan air irigasi;
 - b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan dan optimasi air, dan iklim, konservasi air dan lingkungan hidup, serta kelembagaan pengelolaan air irigasi;
 - c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan dan optimasi air, dan iklim, konservasi air dan lingkungan hidup, serta kelembagaan pengelolaan air irigasi;
 - d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan dan optimasi air, dan iklim, konservasi air dan lingkungan hidup, serta kelembagaan pengelolaan air irigasi;
 - e) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengelolaan Air Irigasi.
- 4). Direktorat Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan pertanian.
- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan program, pembiayaan syariah dan kerja sama, pembiayaan agribisnis, serta kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis;
 - b) pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan program, pembiayaan syariah dan kerja sama, pembiayaan agribisnis, serta kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis;



- c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan program, pembiayaan syariah dan kerja sama, pembiayaan agribisnis, serta kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis;
 - d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan program, pembiayaan syariah dan kerja sama, pembiayaan agribisnis, serta kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis; dan
 - e) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.
- 5) Direktorat Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk dan pestisida pertanian.
- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
 - b) pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
 - c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
 - d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; dan
 - e) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida.
- 6) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang alat dan mesin pertanian.
- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pengawasan, peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian;
 - b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pengawasan, peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian;
 - c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan, pengawasan, peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian;



- d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan, pengawasan, peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian; dan
- e) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

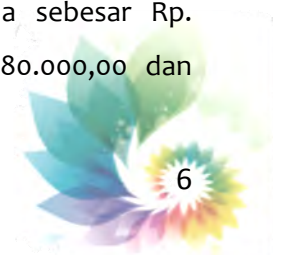
1.4 Dukungan Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapat dukungan sumber daya manusia sebanyak 341 orang yang tersebar pada 6 (enam) Direktorat dengan perincian sebagai berikut. Sekretariat Direktorat sebanyak 84 orang, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan sebanyak 59 orang, Direktorat Pengelolaan Air Irigasi sebanyak 64 orang, Direktorat Pembiayaan Pertanian sebanyak 45 orang, Direktorat Pupuk dan Pestisida sebanyak 55 orang dan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian sebanyak 35 orang. Semua sumber daya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tersusun secara sistematis untuk mendukung kelancaran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian. Secara rinci jumlah pegawai Ditjen PSP tahun 2014 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

1.5. Dukungan Anggaran

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapat dukungan anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 3.195.251.400.000,00. Pada Bulan Juni 2014 mengalami penghematan anggaran, sehingga dukungan anggaran menjadi Rp. 2.715.885.667.000,00. Pada Bulan Desember 2014 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mendapatkan alokasi anggaran tambahan melalui dana contingencies sebesar Rp. 578.145.076.000,00, sehingga alokasi anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2014 menjadi sebesar **Rp. 3.294.030.743.000,00**. Anggaran tersebut terbagi atas Dana Tugas Pembantuan sebesar **Rp. 2.388.791.543.000,00**, Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. **69.929.730.000,00** dan dana satker pusat sebesar **Rp. 835.309.470.000,00**.

Dari dana Pusat sebesar Rp. 835.309.470.000,00 digunakan untuk mendukung kegiatan di 6 (enam) Eselon II yaitu Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan sebesar Rp. 11.560.917.000,00, Direktorat Pengelolaan Air Irigasi sebesar Rp. 30.082.560.000,00 yang terdiri dari Rp. 20.058.535.000,00 (RM) ditambah dengan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri sebesar Rp. 10.024.025.000,00 (RK dan RMP). Direktorat Pembiayaan Pertanian sebesar Rp. 228.042.484.000,00 Direktorat Pupuk dan Pestisida sebesar Rp. 175.513.500.000,00, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian sebesar Rp. 287.915.080.000,00 dan Sekretariat Direktorat Jenderal sebesar Rp. 102.194.929.000,00.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2011-2014

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2011-2014 disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014. Renstra Ditjen PSP disusun dengan periode waktu tahun 2011-2014 karena menyesuaikan dengan adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Pertanian. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian baru terbentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010, sehingga program pembangunan sarana dan prasarana pertanian dijabarkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2011 – 2014. Renstra Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selama periode 2011-2014 telah mengalami review, untuk penyempurnaan dari perubahan kebijakan yang ada.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2011 – 2014 memuat program / kegiatan untuk mendukung 4 (empat) target sukses Kementerian Pertanian. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang akan dilaksanakan oleh Ditjen PSP selama periode 2011-2014. Sesuai review renstra (Agustus 2014) tertuang visi, misi, tujuan dan arah kebijakan sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian, untuk pembangunan pertanian berkelanjutan.

2.1.2 Misi

Untuk mencapai Visi tersebut Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :

- 1) Mendorong partisipasi stake holder dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.



- 2) Mendayagunakan lahan dan air untuk kegiatan pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- 4) Menyusun kebijakan pengembangan perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan.
- 5) Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana.
- 6) Memfasilitasi penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)
- 7) Meningkatkan pengawasan atas penyediaan, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida
- 8) Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida
- 9) Mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pengawasan pupuk dan pestisida
- 10) Menyelenggarakan pengembangan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.
- 11) Memberikan pelayanan prima dalam bidang perencanaan, administrasi dan manajemen pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan strategis Ditjen PSP adalah **"menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian guna mendukung pengembangan sektor pertanian melalui kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, fasilitasi pupuk dan pestisida, pembiayaan, dan fasilitasi alat dan mesin pertanian"**. Indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun keempat (2014) dan merupakan Indikator Kinerja Utama Ditjen PSP sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2011-2014
1	Menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian guna mendukung pengembangan sektor pertanian melalui kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, fasilitasi pupuk dan pestisida, pembiayaan dan fasilitasi alat dan mesin pertanian	Jumlah penambahan produksi padi	penambahan produksi padi rata-rata pertahun sebesar 6.423.805 Ton GKP

Sumber : Review Renstra Ditjen PSP, 2014



Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan **sasaran yang ingin dicapai Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian** dalam bentuk :

1. Dukungan pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan dengan penambahan produksi padi rata-rata pertahun sebesar 6.423.805 Ton GKP. Penambahan produksi tersebut dicapai melalui kegiatan :
 - 1) Perluasan areal pertanian pada kawasan tanaman pangan (cetak sawah) seluas 264.902 ha dengan asumsi penambahan produksi padi sebanyak 696.445 Ton GKP.
 - 2) Pengembangan optimasi lahan seluas 577.632 Ha dengan asumsi penambahan produksi padi sebanyak 2.223.883 Ton GKP.
 - 3) Pengembangan usahatani padi sawah ramah lingkungan melalui SRI (System of Rice Intensification) seluas 445.838 Ha dengan asumsi penambahan produksi padi sebanyak 579.589 Ton GKP.
 - 4) Terwujudnya pengembangan jaringan dan optimasi air melalui rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT) dan jaringan irigasi pedesaan (JIDES) dan pengembangan tata air mikro (TAM) seluas 1.739.502 Ha dengan asumsi penambahan produksi padi sebanyak 2.661.438 Ton GKP.
 - 5) Terlaksananya kegiatan pengembangan kelembagaan petani pemakai air, serta meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan dalam menangani masalah pengairan sebanyak 2.224 Paket yang diasumsikan dapat menambah produksi padi sebanyak 204.163 Ton GKP.
 - 6) Pengembangan Sentra Usaha Ekonomi Produktif Petani melalui Gapoktan PUAP & Penumbuhan Gapoktan PUAP di 33 propinsi, sejumlah 19.213 Gapoktan yang diasumsikan dapat menambah produksi padi sebanyak 1.796.214 Ton GKP.
 - 7) Tersalurnya pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di 33 provinsi khususnya di daerah sentra produksi beras, sejumlah 39,05 juta ton yang diasumsikan dapat menambah produksi padi sebanyak 17.533.489 Ton GKP.
2. Dukungan terhadap peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian untuk meningkatkan kemandirian pangan melalui :

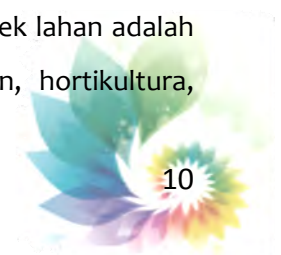


- 1) Terwujudnya perluasan areal pertanian pada kawasan hortikultura seluas 19.879 ha, perkebunan seluas 51.326 ha dan peternakan seluas 16.530 ha.
- 2) Terwujudnya pengembangan (pembangunan dan rehabilitasi) infrastruktur pertanian seperti pembuatan jalan pertanian sepanjang 2.331 km.
- 3) Terwujudnya bidang tanah yang disertifikasi sebanyak 281.400 bidang.
- 4) Terwujudnya pengembangan basis data lahan pertanian yang akurat melalui penyiapan peta dan data lahan serta pemanfaatannya di seluruh Indonesia.
- 5) Terwujudnya upaya konservasi air dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim (melalui pembangunan embung/dam parit dan sekolah lapang iklim) sebanyak 16.059 unit
- 6) Tersalurnya pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di 33 provinsi khususnya di daerah sentra produksi beras, sejumlah 39,05 juta ton.
- 7) Terwujudnya pembangunan rumah kompos di 33 provinsi sebanyak 1.684 unit
- 8) Terwujudnya peningkatan kepemilikan produk alsintan sesuai standar mutu yang berlaku (SNI), di 33 propinsi sebanyak 22.255 unit
- 9) Terlaksananya penumbuhan dan pengembangan kelembagaan alsintan (UPJA), di 33 propinsi sebanyak 10.060 UPJA
- 10) Terlaksananya pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian yang berdaya guna dan berhasil guna di 33 Provinsi
- 11) Pengembangan Sentra Usaha Ekonomi Produktif Petani melalui Gapoktan PUAP & Penumbuhan Gapoktan PUAP di 33 propinsi, sejumlah 19.213 Gapoktan.
- 12) Tersalur & terfasilitasinya petani / peternak melalui penyaluran kredit program KKP-E, sebesar Rp. 22 Trilyun.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam rangka menunjang pembangunan pertanian adalah sebagai berikut:

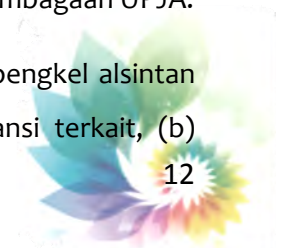
- 1) Kebijakan yang terkait dengan pengembangan infrastruktur pertanian aspek lahan adalah pengembangan jalan pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.



- 2) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, ditempuh melalui:
 - a) Penambahan Baku Lahan (PBL)
 - b) Pendekatan kawasan yang berskala ekonomi
 - c) Kesesuaian daya dukung dan agropedoklimat
 - d) Partisipasi dan pemberdayaan petani.
 - e) Peningkatan efektivitas pembelajaran melalui pendampingan.
- 3) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: terwujudnya upaya optimasi, konservasi, rehabilitasi dan reklamasi lahan pertanian :
 - a) Kebijakan optimasi lahan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat petani/peternak pada lahan terlantar, dan lahan yang berpotensi untuk ditingkatkan IP-nya melalui:
 - Kebijakan pengembangan usahatani dan konservasi DAS hulu yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.
 - Kebijakan Reklamasi lahan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat/ petani pada lahan rawa, bekas tambang, dan bekas industri.
 - Peningkatan efektifitas pembelajaran melalui pendampingan.
 - b) Kebijakan peningkatan kesuburan dan produktivitas lahan melalui pengembangan pertanian ramah lingkungan yang dikenal dengan System of Rice Intensification (SRI).
- 4) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: tercapainya pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil, adalah :
 - a) Diprioritaskan pada kawasan kekeringan dengan mendayagunakan baik air permukaan maupun air tanah.
 - b) Pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil secara berkelanjutan dengan cara partisipatif.
- 5) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: tercapainya optimasi pemanfaatan air irigasi, adalah:
 - a) Peningkatan fungsi prasarana irigasi,
 - b) Penerapan teknologi hemat air
 - c) Peningkatan partisipasi masyarakat.
- 6) Kebijakan terkait dengan revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaan petani dalam rangka meningkatkan ketersediaan pembiayaan/kredit bagi petani, fokus pada :
 - a) Pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan ;



- b) Pembiayaan yang bersumber dari dana lembaga Keuangan Non Bank;
 - c) Pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan swasta dan masyarakat yang peduli terhadap pertanian;
 - d) Pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota);
 - e) Pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan mikro dan lembaga adat yang berkembang di masyarakat; serta sumber pembiayaan lainnya.
- 7) Kebijakan terkait pupuk dan pestisida, adalah:
- a) Penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk mendorong penerapan pemupukan secara berimbang guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
 - b. Kebijakan perbaikan kesuburan lahan pertanian melalui pengembangan rumah kompos dan UPPO untuk pemberian/ penambahan bahan organik/ kompos.
 - c) Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan.
 - d) Peningkatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida pertanian.
- 8) Kebijakan pengembangan alsintan, didalamnya memuat beberapa hal sebagai berikut :
- a) Kebijakan yang terkait dengan sasaran meningkatnya kepemilikan alsintan pada 33 propinsi sebesar 3 – 5 %, adalah : (a) sosialisasi pelaksanaan kegiatan kepemilikan alsintan, (b) koordinasi dengan Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota guna pemantapan kegiatan kepemilikan alsintan, (c) kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan kepemilikan alsintan.
 - b) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya penumbuhan dan pengembangan UPJA Pemula, Berkembang dan Profesional, meningkat masing-masing 10%, 10% dan 15% per tahun, adalah : (a) sosialisasi Permentan No.25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan UPJA, (b) Pembentukan Tim UPJA, (c) kebijakan pemberdayaan dalam pengelolaan UPJA , (d) peningkatan peranan UPJA dalam pengembangan alsintan, (e) kebijakan peningkatan integrasi subsistem pengguna, penyedia alsintan, permodalan dan pembinaan dalam keberlanjutan kelembagaan UPJA.
 - c) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya pengembangan bengkel alsintan di 33 propinsi, adalah : (a) sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi terkait, (b)



peningkatan peranan produsen alsintan dalam pengembangan bengkel, (c) peningkatan keahlian pengelola bengkel alsintan.

d) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian yang berdayaguna dan berhasilguna di 33 provinsi meliputi : (a) sosialisasi pengawasan alsintan (b) meningkatkan jumlah dan kompetensi petugas pengawas alsintan dan (c) meningkatkan sarana pengawasan alsintan.

9). Kebijakan yang terkait dengan kualitas koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan di 33 Provinsi dalam rangka peningkatan forum komunikasi dan informasi pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan

2.1.5 Rencana Aksi

Dalam pencapaian sasaran strategis Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian telah disusun rencana aksi selama setahun yang dilaksanakan dalam rangkaian waktu periodik triwulan dengan jenis kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penerbitan pedoman kegiatan PSP
- 2) Sosialisasi Kegiatan
- 3) Identifikasi calon petani dan calon lokasi
- 4) Pengawasan pemberkasan dokumen bansos sampai dengan transfer dana
- 5) Pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan
- 6) Pemantauan dan pengendalian secara periodik (triwulan)
- 7) Evaluasi pelaksanaan kegiatan
- 8) Pelaporan

Rencana Aksi per triwulan selama tahun 2014 sebagaimana dalam **lampiran 3**.

2.1.6 Program dan Kegiatan

Dalam Renstra Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2011-2014 ditetapkan Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah ***”Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian”***. Kegiatan strategis yang tersebut dalam program tersebut sebagai berikut :



- 1) Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian
- 2) Pengelolaan air irigasi untuk pertanian
- 3) Penyaluran pupuk bersubsidi
- 4) Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian
- 5) Pelayanan pembiayaan pertanian, pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP).
- 6) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014

Kegiatan-kegiatan dalam Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian diprioritaskan untuk mendanai kegiatan prioritas nasional dan prioritas Kementerian Pertanian sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan 2014. RKT Ditjen PSP disusun pada T-1, dan berdasarkan RKT Ditjen PSP TA. 2014 (Maret 2014) disebutkan bahwa sasaran strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2014 adalah Meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. Pada tahun 2014 Ditjen PSP fokus mendukung sasaran strategis pembangunan pertanian pada pencapaian swasembada padi melalui jumlah penambahan produksi padi sebagai indikator kinerja utama, sebagai berikut :

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ditjen PSP TA. 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	Jumlah penambahan produksi padi	5.405.544 Ton GKP

Sumber data : Rencana Kinerja Tahunan Ditjen PSP, 2013

Dalam RKT Ditjen PSP disebutkan bahwa untuk mencapai Indikator Kinerja Utama dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2014 maka upaya utama yang dilakukan adalah sebagai berikut:



1. Perluasan Sawah

Penambahan produksi padi dari kegiatan perluasan sawah diperoleh melalui perluasan sawah (carry over) tahun 2013 dan perluasan sawah tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

a. Perluasan sawah (carry over) tahun 2013 seluas 39.800 Ha

Dari perhitungan perluasan sawah (carry over) tahun 2013 seluas 39.800 Ha dengan asumsi delta IP 100 % dan delta provitas 2,30 Ton/Ha maka didapat kontribusi produksi padi sebesar 91.540,00 Ton GKP.

b. Perluasan sawah tahun 2014 seluas 40.000 Ha

Dari perhitungan perluasan sawah tahun 2014 seluas 40.000 Ha dengan asumsi delta IP 100 % dan delta provitas 2,30 Ton/Ha maka didapat kontribusi produksi padi sebesar 92.000,00 Ton GKP.

2. Pengembangan Optimasi Lahan untuk komoditas padi seluas 166.130 Ha

Dari perhitungan pengembangan optimasi lahan untuk komoditas padi seluas 166.130 Ha dengan asumsi delta IP 100 % dan delta provitas 3,85 Ton/Ha maka didapat kontribusi produksi padi sebesar 639.600,50 Ton GKP.

3. Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) yang dilaksanakan oleh petani/kelompok tani seluas 180.000 Ha.

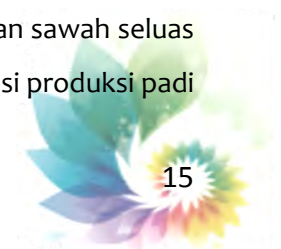
Dari perhitungan pengembangan SRI (System of Rice Intensification) yang dilaksanakan oleh petani/kelompok tani seluas 180.000 Ha dengan asumsi delta IP 100 % dan delta provitas 1,30 Ton/Ha maka didapat kontribusi produksi padi sebesar 234.000,00 Ton GKP.

4. Pengembangan Jaringan Irigasi 500.000 Ha yang dimanfaatkan petani/kelompok tani untuk kegiatan usahatani

Dari perhitungan pengembangan jaringan irigasi 500.000 Ha yang dimanfaatkan petani/kelompok tani untuk kegiatan usahatani dengan asumsi delta provitas 1,53 Ton/Ha maka didapat kontribusi produksi padi sebesar 765.000,00 Ton GKP.

5. Pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) sebesar 500 Unit

Dari perhitungan Pengelolaan Irigasi Partisipatif sebesar 500 Unit pada lahan sawah seluas 30.000 Ha dengan asumsi delta provitas 1,53 Ton/Ha maka didapat kontribusi produksi padi sebesar 45.900,00 Ton GKP.



6. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi urea untuk komoditas padi sebesar 1.861.164 Ton

Dari perhitungan penyaluran pupuk bersubsidi urea untuk komoditas padi sebesar 1.861.164 Ton pada lahan sawah seluas 9.305.818 Ha dengan asumsi delta provitas 0,35 Ton/Ha maka didapat kontribusi produksi padi sebesar 3.257.036,17 Ton GKP.

7. Penyaluran Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) untuk komoditas padi sebesar 1.200 Gapoktan

Dari perhitungan penyaluran Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) untuk komoditas padi sebesar 1.200 Gapoktan pada lahan sawah seluas 40.067 Ha dengan asumsi provitas 7,00 Ton/Ha maka didapat kontribusi produksi padi sebesar 280.467,45 Ton GKP.

Dari semua perhitungan kegiatan utama di atas maka didapat Jumlah Penambahan Produksi Padi sebagai Indikator Kinerja Utama sebesar 5.405.544 Ton GKP. Angka Sasaran dalam RKT berbeda dengan angka sasaran baik pada renstra maupun PK. Hal ini karena RKT disusun pada T-1 (sesuai permentan 135 tahun 2013) sedangkan PK disusun pada tahun penganggaran. Ditjen PSP melakukan revisi PK pada bulan Agustus 2014 karena adanya penghematan anggaran kemudian diikuti dengan review renstra (target dalam review renstra sesuai angka target PK yang telah direvisi). Perbedaan target sasaran penambahan produksi pada RKT, PK dan Renstra dipengaruhi oleh angka target kuantitas pupuk bersubsidi, dimana pada RKT masih digunakan dasar peraturan no. 123 /permentan/SR130/11/2013 tanggal 29 november 2013, sedangkan pada PK dan renstra, angka target kuantitas pupuk bersubsidi didasarkan pada Permentan No 103 thn 2014 tanggal 4 agustus 2014.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Ditjen PSP sebagaimana dalam **lampiran 4**.

2.3 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014

Penetapan Kinerja merupakan kontrak kerja antara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Menteri Pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung Program Kementerian Pertanian. Penetapan kinerja ini menjadi dokumen untuk mewujudkan capaian strategis Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Pada Bulan Agustus 2014, dilakukan revisi terhadap dokumen PK Ditjen PSP. Berdasarkan Revisi PK tersebut, disebutkan bahwa penetapan kinerja yang ditetapkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2014 sebagai berikut :



Tabel 2. Penetapan Kinerja (PK) Ditjen PSP TA. 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	Jumlah penambahan produksi padi	5.740.609 Ton GKP

Sumber data : Penetapan Kinerja Tahunan Ditjen PSP, Kementerian Pertanian, 2014

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) sebelum dan setelah revisi yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal PSP dan Menteri Pertanian tertuang dalam **lampiran 5**.

2.3.1 Meningkatkan Produktivitas Pertanian melalui Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian terukur pada pencapaian indikator kinerja utama yaitu jumlah penambahan produksi padi. Untuk itu hal yang akan diulas secara lebih rinci dan mendalam adalah kegiatan utama yang menjadi **sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)** Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian **dalam menunjang penambahan produksi padi** berikut ini :

Tabel 3. Kegiatan Utama pada Indikator Kinerja Utama Penambahan Produksi Padi Tahun 2014

Indikator Kinerja	Kegiatan Utama	Output Kegiatan
Jumlah penambahan produksi Padi 5,740,609 Ton gkp	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	* Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air 446.810 Ha
		* Pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) sebesar 500 Unit
	Perluasan dan Pengelolaan Lahan untuk Pertanian	* Perluasan sawah 2013 (Carry Over) seluas 39.800 Ha
		* Perluasan sawah 2014 seluas 29.282 Ha
		* Pengembangan Optimasi Lahan pertanian tanaman pangan seluas 147.394 Ha
		* Pengembangan Metode SRI (System of Rice Intensification) seluas 167.438 Ha
	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida untuk Pertanian	* Penyaluran pupuk urea bersubsidi untuk tanaman padi sejumlah 3.906.919 Ton
	Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	* Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada 1.713 Gapoktan

Sumber data : Ditjen PSP, Kementerian Pertanian, 2014



2.3.1.1. Jumlah Penambahan Produksi Padi

Pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian fokus mendukung sasaran strategis pembangunan pertanian pada pencapaian swasembada padi melalui Jumlah Penambahan Produksi Padi sebagai Indikator Kinerja Utama. Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2014 maka upaya utama yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan kegiatan yang mendukung produksi padi sebagai berikut:

1). Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air

Ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan jaringan Irigasi. Kegiatan ini adalah kegiatan pembangunan baru/rehabilitasi jaringan irigasi baik tingkat usaha tani maupun tingkat desa guna meningkatkan fungsi, pelayanan dan memperbaiki pola operasi serta pemeliharaan jaringan irigasi.

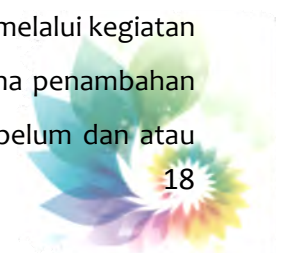
Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi ditargetkan seluas 446.810 Ha di 31 Provinsi dan 295 Kabupaten. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi adalah sebesar Rp.446.810.000.000,00.

2). Pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif)

Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan yaitu berupa kegiatan (1) Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air (P3A) dimana aspek Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK), Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan fasilitas Legalitas Kelompok P3A menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dan (2) Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP), dilaksanakan melalui pola bantuan sosial berupa kegiatan rehabilitasi/lining jaringan irigasi, pembangunan bendung, pengembangan irigasi permukaan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah (JIAT). Berdasarkan rencana PK TA. 2013 sebanyak 500 paket (30.000 Ha) yang tersebar di 30 propinsi dan 237 kabupaten. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 40.000.000.000,00.

3). Perluasan Sawah

Peningkatan luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan dilaksanakan melalui kegiatan perluasan areal sawah/cetak sawah. Perluasan Areal Sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau



lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usahatani sawah. Perluasan areal sawah baru dilakukan dengan menambah luas areal tanam padi guna mendukung pencapaian surplus beras dan swasembada beras berkelanjutan. Sasaran dari Kegiatan Perluasan Sawah tahun 2014 adalah bertambahnya luas lahan sawah sebesar 29.282 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan di 71 Kabupaten pada 21 Provinsi. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan perluasan sawah adalah sebesar Rp. 292.338.000.000,00.

4). Pengembangan Optimasi Lahan Pertanian

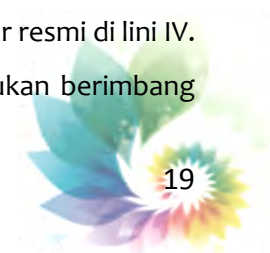
Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan yang sementara tidak diusahakan atau IP rendah menjadi lahan usahatani yang lebih produktif, melalui perbaikan fisik dan kimiawi tanah serta bantuan sarana dan prasarana lainnya dalam menunjang peningkatan areal tanam dan atau indeks pertanaman (IP). Jika dilaksanakan pada lahan kering berlereng, maka dapat diterapkan kaidah konservasi untuk mencegah erosi dan penurunan produktivitas lahan. Khusus pada daerah rawa dan bekas tambang dapat diterapkan teknologi reklamasi untuk mengoptimalkan produktivitas lahan. Pelaksanaan fisik meliputi pembersihan lahan dan pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam, perbaikan kesuburan lahan, perbaikan sarana dan prasarana serta pemeliharaan. Sasaran kegiatan ini adalah terealisasinya kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan dengan target 147.394 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan di 355 Kabupaten/Kota pada 32 Provinsi dengan alokasi anggaran untuk kegiatan bansos optimasi lahan sebesar Rp. 352.546.700.000,00.

5). Pengembangan Metode SRI

Pengembangan Metode SRI merupakan cara budidaya tanaman padi yang intensif dan efisien dengan proses manajemen pengelolaan air, pengelolaan lahan dan tanaman yang dapat meningkatkan produktivitas, serta efisiensi usahatani melalui pemberdayaan kelompok tani dan kearifan lokal/daerah. Sasaran kegiatan ini adalah terealisasinya Pengembangan Metode SRI dengan target 167.438 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan di 242 Kabupaten pada 29 Provinsi di Indonesia dengan alokasi anggaran untuk kegiatan bansos pengembangan metode SRI sebesar Rp. 334.876.000.000,00.

6). Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV. Sasaran kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah diterapkannya pemupukan berimbang



spesifik lokasi di tingkat petani, untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi serta memperbaiki kualitas hasil komoditas pertanian.

Kegiatan Penyaluran pupuk bersubsidi ditargetkan sebanyak 4.100.000 Ton untuk pupuk urea, 850.000 Ton untuk pupuk SP-36, 1.050.000 Ton untuk pupuk ZA, 2.550.000 Ton untuk pupuk NPK dan 1.000.000 Ton untuk pupuk Organik. Sedangkan dana yang tersedia sesuai DIPA Nomor : SP DIPA -999.07.1.98149/2014 ditetapkan sebesar RP. 21.047,254 Milyar yang terdiri dari kegiatan kurang bayar tahun 2013 sebesar Rp. 3.000,000 Milyar dan kegiatan subsidi pupuk Rp 18.047,254 Milyar yang terinci Rp. 6.039,86 Milyar untuk pupuk urea, Rp. 2.577,20 Milyar untuk pupuk SP-36, Rp. 1.402,87 Milyar untuk pupuk ZA, Rp. 6.899,83 Milyar untuk pupuk NPK, dan Rp. 1.127,49 Milyar untuk pupuk organik yang dilaksanakan di 33 Provinsi.

7). Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) adalah merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Sasaran kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) adalah berkembangnya usaha agribisnis di desa miskin terjangkau sesuai potensi pertanian desa. Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) pada Penetapan Kinerja (PK) ditargetkan sebanyak 1.713 gapoktan dengan alokasi dana sebesar Rp. 171.300.000.000,00.

2.3.1.2. Dukungan dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Pertanian

Dukungan dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dilakukan melalui sejumlah kegiatan pendukung lainnya, meliputi:



Tabel 4. Kegiatan Pendukung Dalam Peningkatan Produktivitas Pertanian Tahun 2014

Kegiatan	Output Kegiatan
Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	* Pengembangan sumber air 280 Unit
	* Pengembangan konservasi air/antisipasi anomali iklim 9.600 Unit
Perluasan dan Pengelolaan Lahan untuk Pertanian	* Pra sertifikasi dan pasca sertifikasi lahan petani sebanyak 64.800 bidang
	* Perluasan Areal Hortikultura seluas 2.500 Ha
	* Perluasan Areal Perkebunan seluas 11.000 Ha
	* Perluasan Areal Peternakan seluas 2.500 Ha
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida untuk Pertanian	* Penerbitan Permentan tentang Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2015
	* Sosialisasi permentan tahun 2015 tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2015 di 33 propinsi
	* Penerbitan petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi
	* Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014 di 16 Propinsi
	* Pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) 830
	* Menerbitkan 50 sampel mutu pupuk yang beredar
	* Menerbitkan 50 sampel mutu pestisida yang beredar
	* Menerbitkan 200 ijin pendaftaran pupuk
	* Menerbitkan 200 ijin pendaftaran pestisida
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian	* Penyediaan alat dan mesin pertanian : a. Traktor Roda 2 sejumlah 7.581 unit b. Pompa Air sejumlah 4.100 unit c. Rice Transplanter sejumlah 279 unit d. Chopper sejumlah 225 unit e. Cultivator sejumlah 240 unit
	* Pengawasan terhadap 10 jenis alsintan
Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	* Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) sebesar Rp. 2 trilyun.
	* Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian oleh perbankan sebesar Rp. 5 trilyun.
	* Pelaksanaan 3000 Ha model asuransi pertanian
	* Pelatihan 50 LKMA dalam mengelola dana BLM PUAP

Sumber data : Ditjen PSP, Kementerian Pertanian, 2014



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2014 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

3.1.2 Pencapaian Sasaran Strategis Ditjen PSP Tahun 2014

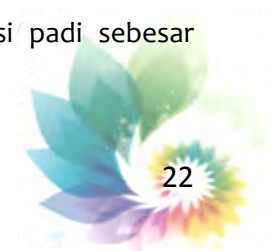
Pencapaian sasaran strategis Ditjen PSP ditentukan melalui capaian indikator kinerja utama. Pengukuran capaian kinerja kegiatan utama dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi kinerja dengan angka target kinerja dalam indikator kinerja utama pada Penetapan Kinerja. Capaian kinerja Ditjen PSP sebagaimana Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kesimpulan
1.	Meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	Jumlah penambahan produksi padi	5.740.609 Ton GKP	5.509.493 Ton GKP	95,97	Berhasil

Sumber data : PK dan Hasil Pengukuran Kinerja Ditjen PSP, 2014

Capaian sasaran PK Ditjen PSP TA. 2014 yaitu meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, diukur berdasarkan capaian indikator kinerja utama 'jumlah penambahan produksi padi sebesar



5.740.609 Ton GKP '. Dari target Jumlah penambahan produksi padi **5.740.609 Ton GKP** terealisasi sebesar **5.509.493 Ton GKP (95,97%)**. Hasil capaian tersebut disimpulkan **“Berhasil”**.

Capaian indikator kinerja utama tersebut dicapai melalui upaya pencapaian output kegiatan utama sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Utama melalui Capaian Outcome Kegiatan Utama Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2014

Indikator Kinerja	Output Kegiatan	Target		Realisasi		Outcome (Ton GKP)
		(Ha/pkt/Ton)	(Ha)*	(Ha/pkt/Ton)	(Ha)*	
Jumlah penambahan produksi Padi 5.740.609 Ton gkp	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air 446.810 Ha	446.810	446.810	443.836	443.836	679.069
	Pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) sebesar 500 pkt	500	30.000	498	29.880	45.716
	Perluasan sawah 2013 (Carry Over) seluas 39.800 Ha	39.800	39.800	39.800	39.800	91.540
	Perluasan sawah 2014 seluas 29.282 Ha	29.282	29.282	25.597	25.597	58.873
	Pengembangan Optimasi Lahan pertanian tanaman pangan seluas 147.394 Ha	147.394	147.394	122.485	122.485	471.567
	Pengembangan Metode SRI (System of Rice Intensification) seluas 167.438 Ha	167.438	167.438	161.719	161.719	210.235
	Penyaluran pupuk bersubsidi Urea untuk komoditas padi sejumlah 3.906.919 Ton (11.162.625 Ha)	3.906.919	11.162.625	2.167.055	10.835.273	3.792.346
	Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada 1.713 Gapoktan	1.713	22.878	1.713	22.878	160.147
	Total					5.509.493

Ket : *) hasil konversi satuan pkt/ton ke dalam Ha

Sumber data : Ditjen PSP, Kementerian Pertanian, 2014

3.1.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Ditjen PSP Tahun 2014

3.1.3.1. Meningkatnya Produktivitas Pertanian melalui Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Indikator utama sasaran meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, diukur berdasarkan capaian indikator kinerja utama 'jumlah penambahan produksi padi'. Dari target Jumlah penambahan produksi padi **5.740.609 Ton GKP** terealisasi sebesar **5.509.493 Ton GKP (95,97%)** dan disimpulkan **“Berhasil”**.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan alokasi anggaran Ditjen PSP sebesar Rp.3.314.138.708.757,00 melalui pelaksanaan kegiatan utama didalamnya, tercapai kontribusi peningkatan produksi padi sebesar 6.193.301 Ton GKP. Sedangkan pada tahun 2014 dengan anggaran Ditjen PSP Rp. 2.907.298.709.246,00, melalui pelaksanaan kegiatan utama didalamnya tercapai kontribusi sebesar 5.509.493 Ton GKP. Penurunan alokasi anggaran pada

TA. 2014 (jika dibandingkan tahun 2013) menyebabkan terjadinya penurunan jumlah output kegiatan utama dan berpengaruh terhadap penurunan kontribusi terhadap peningkatan produksi padi sejumlah 683.807 ton GKP, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2013 dan TA. 2014

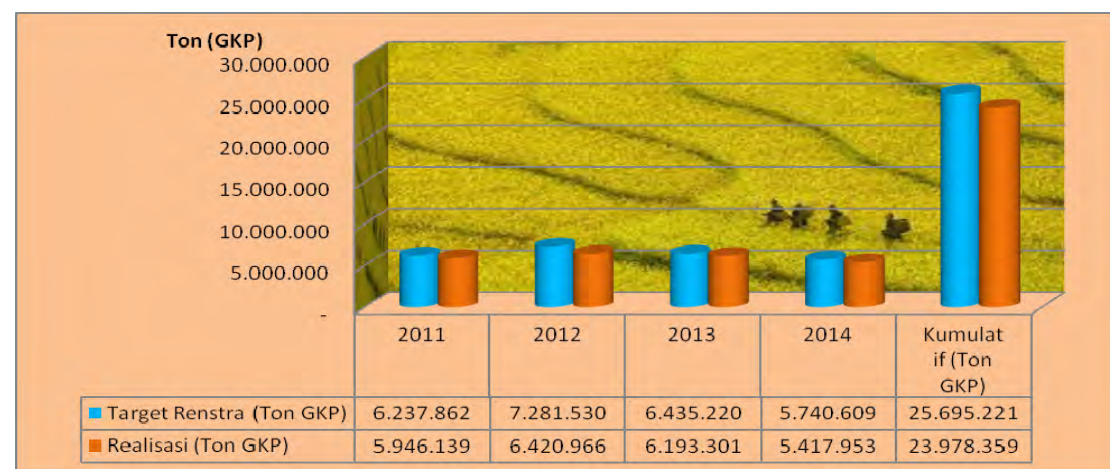
Output Kegiatan	Tahun 2013			Tahun 2014			Delta Outcome
	Realisasi		Outcome (Ton GKP)	Realisasi		Outcome (Ton GKP)	
	(Ha/pkt/Ton)	(Ha*)		(Ha/pkt/Ton)	(Ha*)		
Pengembangan Jaringan dan Optimalisasi Air	541.972	541.972	829.217	443.836	443.836	679.069	-150.148
Pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif)	751	45.060	68.942	498	29.880	45.716	-23.225
Perluasan sawah	18.109	18.109	41.651	25.597	25.597	58.873	17.222
Perluasan sawah Carry Over 2013				39.800	39.800	91.540	91.540
Pengembangan Optimalisasi Lahan pertanian tanaman pangan	253.321	253.321	975.286	122.485	122.485	471.567	-503.719
Pengembangan Metode SRI (System of Rice Intensification)	205.400	205.400	267.020	167.438	161.719	210.235	-56.785
Penyaluran pupuk bersubsidi Urea untuk tanaman padi	2.115.812	10.579.058	3.702.671	2.167.055	10.835.273	3.792.346	89.675
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	3.300	44.073	308.514	1.713	22.878	160.147	-148.367
Total			6.193.301			5.509.493	683.807

Ket : *) hasil konversi satuan pkt/ton ke dalam Ha

Sumber data : Ditjen PSP, Kementerian Pertanian, 2014

Sementara itu jika dibandingkan dengan target renstra 2011-2014 (**lampiran 6**), target capaian penambahan produksi padi adalah sebesar 25.695.221 Ton GKP, sedangkan sampai dengan TA. 2014 telah tercapai kontribusi sebesar 23.978.359 Ton GKP (93,32%). Capaian penambahan produksi padi selama tahun 2011-2014 sebagai berikut :

Gambar 1. Capaian Penambahan Produksi Padi Tahun 2011-2014



Sumber data: Renstra dan Hasil pengukuran kinerja Ditjen PSP, 2014

3.1.3.2 Jumlah Penambahan Produksi Padi

Pada TA. 2014, capaian indikator jumlah penambahan produksi padi ditentukan oleh capaian outcome kegiatan utama yang mendukung penambahan produksi padi, yaitu : 1). Pengembangan jaringan dan optimasi air seluas 443.836 Ha memberikan kontribusi 679.069 ton GKP, 2). Pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air sebanyak 498 paket (29.880 Ha) memberikan kontribusi 45.716 ton GKP, 3). Perluasan sawah 2013 (carry over) seluas 39.800 Ha dan perluasan sawah 2014 seluas 25.597 Ha memberikan kontribusi masing-masing sebesar 91.540 dan 58.873 ton GKP, 4). Pengembangan Optimasi Lahan Pertanian untuk komoditas padi seluas 122.485 Ha memberikan kontribusi 471.567 ton GKP, 5). Pengembangan Metode SRI seluas 161.719 Ha memberikan kontribusi 210.235 ton GKP, 6). Penyaluran pupuk urea bersubsidi untuk tanaman padi sejumlah 2.167.055 ton (10.835.273 Ha) memberikan kontribusi 3.792.346 ton GKP, 7). Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan untuk 1.713 Gapoktan (22.878 Ha) memberikan kontribusi 160.147 ton GKP.

Tidak tercapainya penambahan produksi padi sesuai target (capaian 95,97%) dipengaruhi oleh beberapa hal berikut :

- 1) Belum tercapainya pengembangan jaringan dan optimasi air, dari target 446.810 Ha terealisasi 443.836 Ha (99,33%)
- 2) Belum tercapainya pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air dari target 500 paket terealisasi 498 paket (99,60%)
- 3) Belum tercapainya perluasan sawah, dari target 29.282 Ha terealisasi 25.597 Ha (87,42%)
- 4) Belum tercapainya Optimasi lahan pertanian untuk komoditas padi, dari target 147.394 Ha terealisasi 122.485 Ha (83,02%)
- 5) Belum tercapainya Pengembangan metode SRI, dari target 167.438 Ha terealisasi 161.719 Ha 96,58%)
- 6) Belum tercapainya penyaluran pupuk urea bersubsidi untuk tanaman padi, dari target 2.232.525 ton terealisasi 2.167.055 ton (97,07%)

Analisis selengkapanya sebagai berikut :



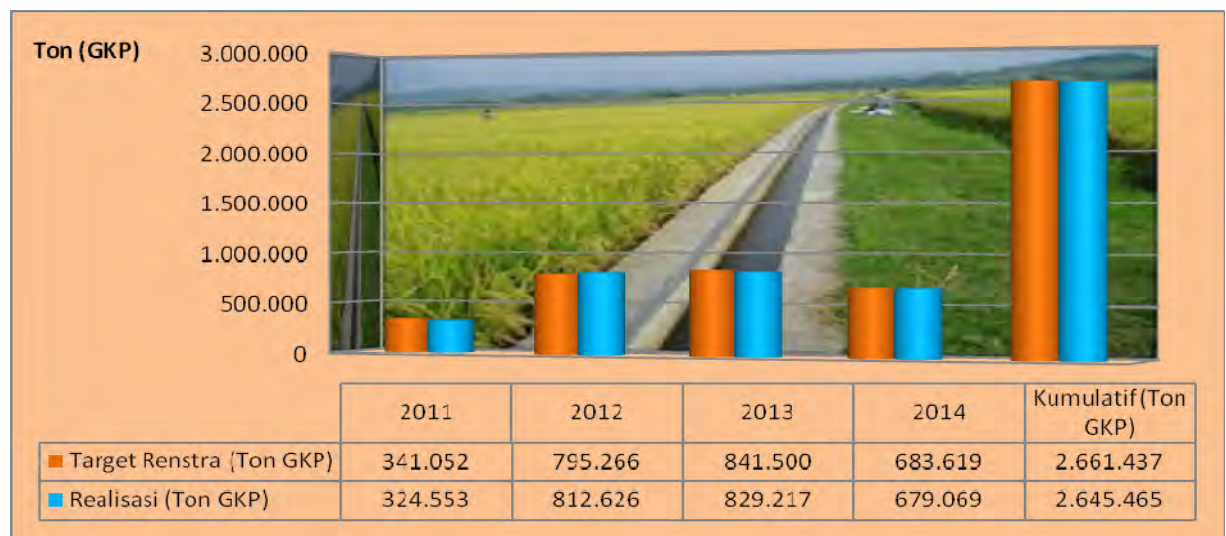
1). Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan pengembangan jaringan dan optimasi air yaitu 'jumlah pengembangan jaringan dan optimasi air' dari target 446.810 Ha terealisasi 443.836 Ha **(99,33%)** dengan kontribusi penambahan produksi padi sejumlah 679.069 ton GKP. Capaian ini termasuk kategori **"Berhasil"**.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan anggaran Rp. 541.972.000.000,00 tercapai pengembangan jaringan dan optimasi air 541.972 Ha, sedangkan pada tahun 2014 dengan anggaran Rp.443.836.000.000,00, tercapai pengembangan jaringan dan optimasi air 443.836 Ha. Penurunan alokasi anggaran pengembangan jaringan dan optimasi air pada TA. 2014 (jika dibandingkan tahun 2013) menyebabkan terjadinya penurunan pada pengembangan jaringan dan optimasi air sebesar 98.136 Ha atau penurunan kontribusi sejumlah 150.148 Ton GKP **(22,11%)**. Sementara itu jika dibandingkan dengan target renstra 2011-2014, kontribusi pengembangan jaringan dan optimasi air adalah sebesar 2.661.437 Ton GKP, posisi capaian kontribusi sampai dengan TA. 2014 ini sudah mencapai 2.645.465 Ton GKP (99,40%).

Kontribusi kegiatan pengembangan jaringan dan optimasi air selama tahun 2011-2014 sebagai berikut :

Gambar 2. Kontribusi Kegiatan Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air Tahun 2011-2014



Sumber data: Renstra dan Hasil pengukuran kinerja Ditjen PSP, 2014

Target capaian belum mencapai 100% disebabkan beberapa hal antara lain :

- 1) Adanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan pada tahun berjalan.



- 2) Adanya proses penghematan anggaran di tahun berjalan yang mengakibatkan adanya revisi DIPA/POK, relokasi kegiatan dan keterlambatan pencairan dana.
- 3) Adanya realokasi kegiatan ke kabupaten lain karena lokasi yang ditetapkan termasuk lahan pengembangan pembangunan pada kawasan dari sumber dana APBD kabupaten.

Upaya tindak lanjut yang sudah dilakukan sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi melalui surat, telepon serta menugaskan Tim ke sebagian Kabupaten/Kota pelaksana Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi.
- 2) Percepatan pelaksanaan kegiatan setelah terjadi proses penghematan dengan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan yang intensif

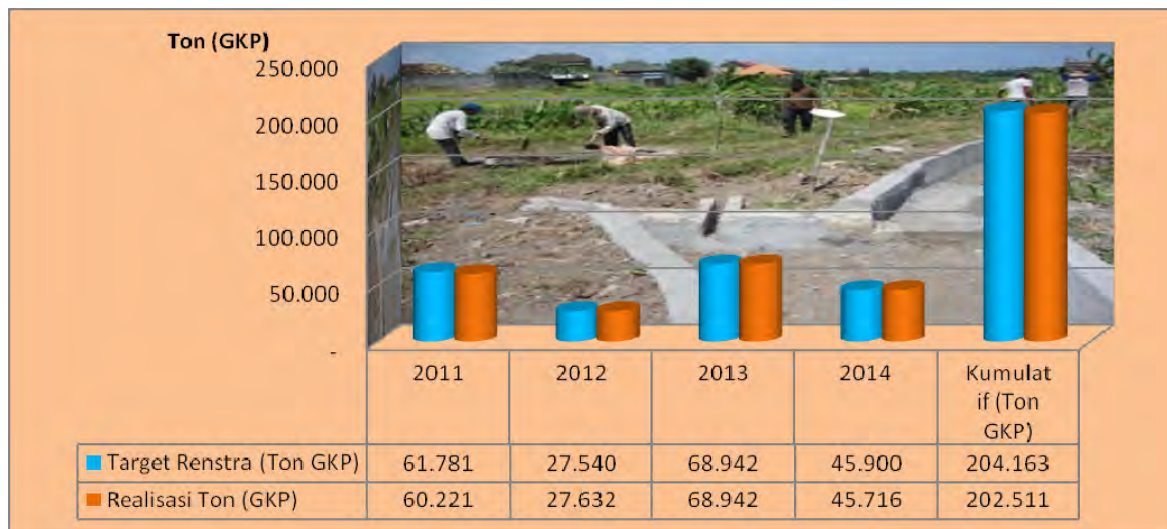
2). Pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif)

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan pengembangan kelembagaan petani pemakai air yaitu 'jumlah pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui pemberdayaan P3A dan pengembangan irigasi partisipatif) dari target 500 paket (30.000 Ha) terealisasi 498 paket (29.880 Ha) atau 99,60% dengan kontribusi penambahan produksi padi sejumlah 45.716 ton GKP. Capaian ini termasuk kategori **"Berhasil"**.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan anggaran Rp.60.080.000.000,00 tercapai pengembangan kelembagaan petani pemakai air 751 paket (45.060 Ha), sedangkan pada tahun 2014 dengan anggaran Rp. 39.840.000.000,00, tercapai pengembangan kelembagaan petani pemakai air 498 paket (29.880Ha). Penurunan alokasi pada TA. 2014 (jika dibandingkan tahun 2013) menyebabkan terjadinya penurunan pada pengembangan kelembagaan petani pemakai air sebesar 253 paket (15.180 Ha) atau penurunan kontribusi sejumlah 23.225 Ton GKP (**50,8%**). Sementara itu jika dibandingkan dengan target renstra 2011-2014, kontribusi pengembangan kelembagaan petani pemakai air adalah sebesar 204.163 Ton GKP, posisi capaian kontribusi sampai dengan TA. 2014 ini sudah mencapai 202.511 Ton GKP (99,19%). Kontribusi kegiatan pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui pemberdayaan P3A dan pengembangan irigasi partisipatif) selama tahun 2011-2014 sebagai berikut :



Gambar 3. Kontribusi Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air Tahun 2011-2014



Sumber data: Renstra dan Hasil pengukuran kinerja Ditjen PSP, 2014

Target capaian belum mencapai 100% disebabkan beberapa hal antara lain :

- 1). Adanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan pada tahun berjalan.
- 2). Adanya proses penghematan anggaran di tahun berjalan yang mengakibatkan adanya revisi DIPA/POK, relokasi kegiatan dan keterlambatan pencairan dana.
- 3). Adanya realokasi kegiatan ke kabupaten lain karena lokasi yang ditetapkan termasuk lahan pengembangan pembangunan pada kawasan dari sumber dana APBD kabupaten.

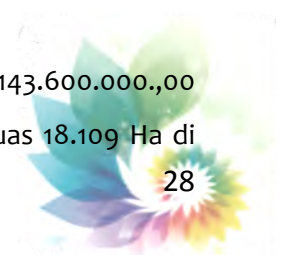
Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi melalui surat, telepon serta menugaskan Tim ke sebagian Kabupaten/Kota pelaksana Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi.
- 2) Percepatan pelaksanaan kegiatan setelah terjadi proses penghematan dengan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan yang intensif.

3). Perluasan Sawah

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan perluasan sawah yaitu 'jumlah perluasan sawah' dari target 29.282 Ha terealisasi 25.597 Ha atau 87,42% dengan kontribusi penambahan produksi padi sejumlah 58.873 ton GKP. Capaian ini termasuk kategori **“ Berhasil”**.

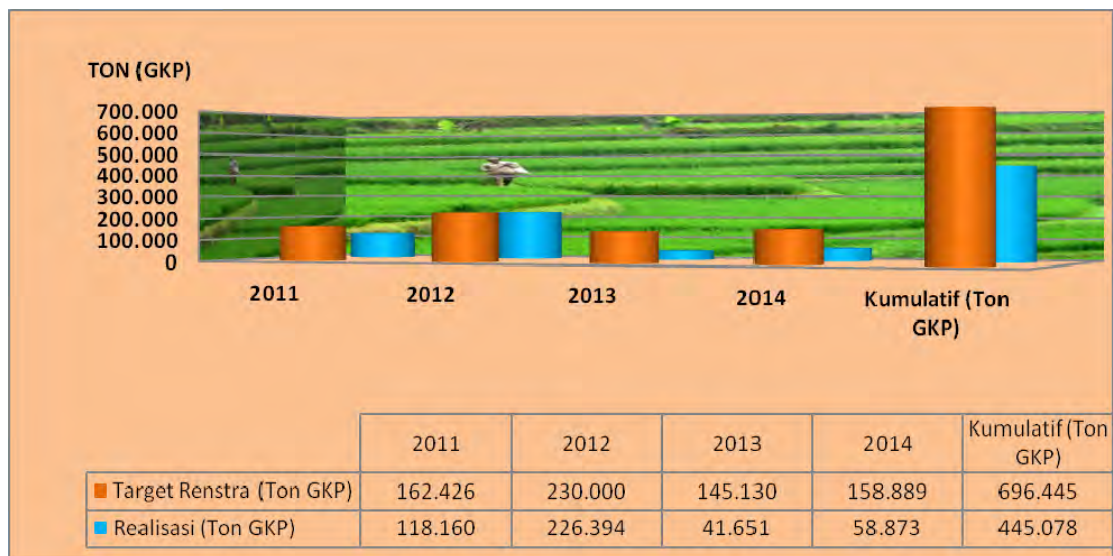
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan anggaran Rp.617.143.600.000,00 tercapai perluasan sawah seluas 57.909 Ha (untuk perhitungan outcome, seluas 18.109 Ha di



2013 dan 39.800 Ha di 2014), sedangkan pada tahun 2014 dengan anggaran Rp. 292.338.000.000,00, tercapai perluasan sawah seluas 25.597 Ha. Penurunan alokasi anggaran perluasan sawah pada TA. 2014 (jika dibandingkan tahun 2013) menyebabkan terjadinya penurunan pada perluasan sawah seluas 7.488 Ha atau penurunan kontribusi sejumlah 17.222 Ton GKP (**29,25%**). Sementara itu jika dibandingkan dengan target renstra 2011-2014, kontribusi perluasan sawah adalah sebesar 696.445 Ton GKP, posisi capaian kontribusi sampai dengan TA. 2014 ini sudah mencapai 445.078 Ton GKP (63,91%).

Kontribusi kegiatan perluasan sawah selama tahun 2011-2014 sebagai berikut :

Gambar 4. Kontribusi Kegiatan Perluasan Sawah Tahun 2011-2014



Sumber data: Renstra dan Hasil pengukuran kinerja Ditjen PSP, 2014

Target capaian belum mencapai 100% disebabkan beberapa hal antara lain :

- 1). Masih kurang data-data riil lahan yang layak dikembangkan untuk perluasan sawah.
- 2). Adanya proses penghematan anggaran di tahun berjalan yang mengakibatkan adanya revisi DIPA/POK, relokasi kegiatan dan keterlambatan pencairan dana.
- 3). Daerah belum memiliki *road map* pengembangan kawasan tanaman pangan yang integral.
- 4). Penyusunan RUKK yang kurang cermat.
- 5). Kualitas pekerjaan kurang optimal.
- 6). Data produktivitas lahan sawah baru belum dilaporkan semuanya, sehingga belum terkompilasi utuh.



Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai berikut :

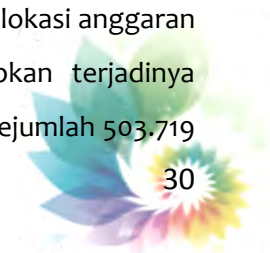
- 1). Meningkatkan pendataan secara detil terhadap potensi lahan yang layak dikembangkan untuk perluasan sawah dari peta RTRW yang telah disusun.
- 2). Percepatan pelaksanaan kegiatan setelah terjadi proses penghematan dengan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan yang intensif.
- 3). Menyarankan pemerintah daerah agar menaruh perhatian serius terhadap pengembangan kawasan sawah baru dan menyusun perencanaan detil dalam wujud road map yang dijadikan acuan dalam perencanaan tahunan nantinya.
- 4). Meningkatkan pengendalian dan monitoring yang intens terhadap RUKK yang disusun untuk kegiatan perluasan sawah. Terutama karena besarnya total anggaran yang diterima oleh kelompok untuk kegiatan ini.
- 5). Melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring yang intens agar pelaksanaan pekerjaan fisik perluasan sawah sesuai dengan ketentuan dan menghasilkan sawah baru yang dapat berkontribusi bagi ketersediaan pangan nasional.
- 6). Meningkatkan monitoring dan pendataan yang intensif terhadap keberadaan sawah-sawah baru ini dan tingkat produksinya.

4). Pengembangan Optimasi Lahan Pertanian

Pengembangan optimasi lahan pertanian mendukung sub sektor pangan, hortikultura dan perkebunan pada TA. 2014 adalah sebesar 171.974 Ha dan terealisasi sebesar 142.773 Ha (83,03%). Dari total pengembangan optimasi lahan tersebut, target optimasi lahan untuk komoditas padi adalah sebesar 147.394 Ha.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan pengembangan optimasi lahan pertanian yaitu 'jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian' untuk komoditas padi dari target 147.394 Ha terealisasi 122.485 Ha atau **83,02%** dengan kontribusi penambahan produksi padi sejumlah 471.567 ton GKP. Capaian ini termasuk kategori **"Berhasil"**.

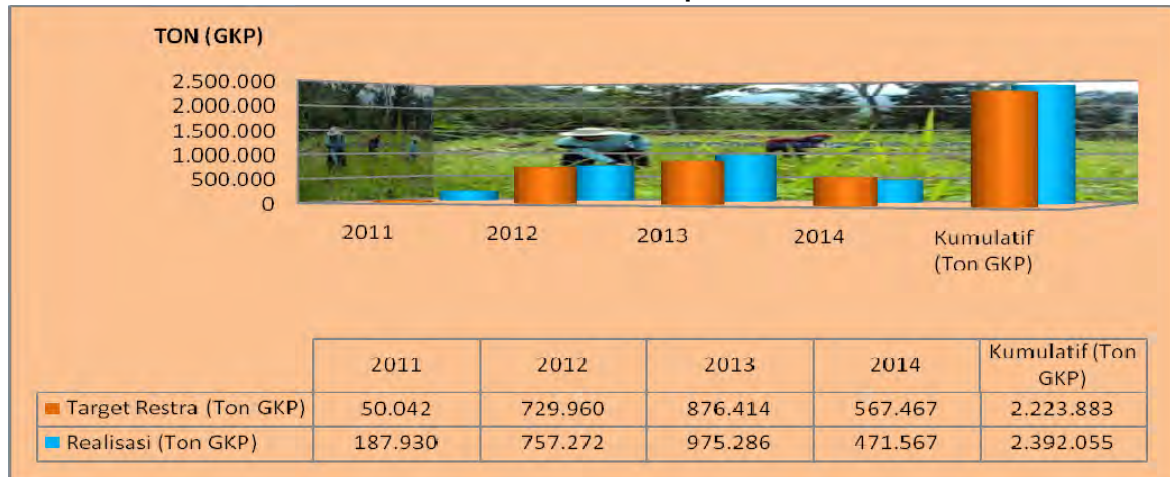
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan anggaran Rp.523.344.500.000,00 tercapai optimasi lahan seluas 253.321 Ha, sedangkan pada tahun 2014 dengan anggaran Rp. 349.003.910.000,00 tercapai optimasi lahan seluas 122.485 Ha. Penurunan alokasi anggaran optimasi lahan pada TA. 2014 (jika dibandingkan tahun 2013) menyebabkan terjadinya penurunan pada optimasi lahan seluas 130.836 Ha atau penurunan kontribusi sejumlah 503.719



Ton GKP (**106,82%**). Sementara itu jika dibandingkan dengan target renstra 2011-2014, kontribusi optimasi lahan adalah sebesar 2.223.883 Ton GKP, posisi capaian kontribusi sampai dengan TA. 2014 ini sudah mencapai 2.392.055 Ton GKP (107,56%).

Kontribusi kegiatan pengembangan optimasi lahan selama tahun 2011-2014 sebagai berikut :

Gambar 5. Kontribusi Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Tahun 2011-2014



Sumber data: Renstra dan Hasil pengukuran kinerja Ditjen PSP, 2014

Target capaian belum mencapai 100% disebabkan beberapa hal antara lain :

- 1) Adanya proses penghematan anggaran di tahun berjalan yang mengakibatkan adanya revisi DIPA/POK, relokasi kegiatan dan keterlambatan pencairan dana.
- 2) Adanya realokasi kegiatan ke kabupaten lain karena lokasi yang ditetapkan termasuk lahan pengembangan pembangunan pada kawasan dari sumber dana APBD kabupaten.
- 3) Keterlambatan dalam menetapkan CPCL karena kesulitan memilih lokasi dan petani sesuai pedoman teknis.
- 4) Tahap penanaman dipengaruhi musim hujan.
- 5) Terdapat pelaksanaan kerjaan tidak sesuai RUKK.

Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai berikut :

- 1). Percepatan pelaksanaan kegiatan setelah terjadi proses penghematan dengan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan yang intensif.
- 2). Pengajuan revisi kegiatan disesuaikan dengan tupoksi satker pelaksana kegiatan.
- 3). Menyarankan agar CPCL dilakukan pada T-1.



- 4). Meningkatkan pengendalian dan monitoring yang intens terhadap RUKK yang disusun untuk kegiatan perluasan sawah. Terutama karena besarnya total anggaran yang diterima oleh kelompok untuk kegiatan ini.

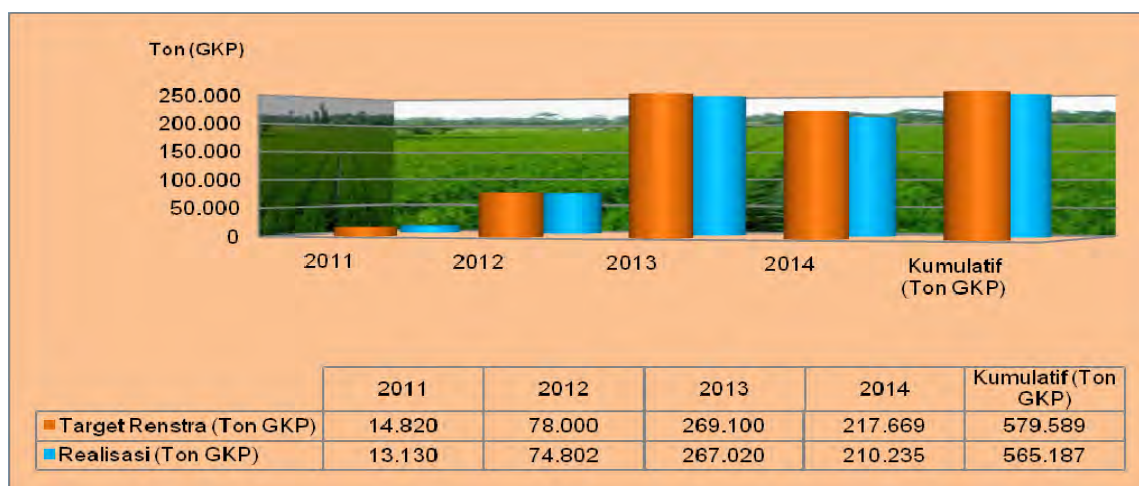
5). Pengembangan Metode System of Rice of Intensification (SRI)

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan pengembangan metode SRI yaitu 'jumlah pengembangan metode SRI' dari target 167.438 Ha terealisasi 161.719 Ha atau **96,58%** dengan kontribusi penambahan produksi padi sejumlah 210.235 ton GKP. Capaian ini termasuk kategori **"Berhasil"**.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan anggaran Rp. 409.840.000.000,00 tercapai pengembangan metode SRI seluas 253.321 Ha, sedangkan pada tahun 2014 dengan anggaran Rp. 333.473.000.000,00, tercapai pengembangan metode SRI seluas 161.719 Ha. Penurunan alokasi anggaran pengembangan metode SRI pada TA. 2014 (jika dibandingkan tahun 2013) menyebabkan terjadinya penurunan pada pengembangan metode SRI seluas 37.962 Ha atau penurunan kontribusi sejumlah 56.785 Ton GKP (**27,01%**). Sementara itu jika dibandingkan dengan target renstra 2011-2014, kontribusi pengembangan metode SRI adalah sebesar 579.589 Ton GKP, posisi capaian kontribusi sampai dengan TA. 2014 ini sudah mencapai 565.187 Ton GKP (97,52%).

Kontribusi kegiatan pengembangan metode SRI selama tahun 2011-2014 sebagai berikut :

Gambar 6. Kontribusi Kegiatan Pengembangan Metode SRI Tahun 2011-2014



Sumber data: Renstra dan Hasil pengukuran kinerja Ditjen PSP, 2014



Target capaian belum mencapai 100% disebabkan beberapa hal antara lain :

- 1) Adanya proses penghematan anggaran di tahun berjalan yang mengakibatkan adanya revisi DIPA/POK, relokasi kegiatan dan keterlambatan pencairan dana.
- 2) Adanya realokasi kegiatan ke kabupaten lain karena lokasi yang ditetapkan termasuk lahan pengembangan pembangunan pada kawasan dari sumber dana APBD kabupaten.
- 3) Keterlambatan dalam menetapkan CPCL karena kesulitan memilih lokasi dan petani sesuai pedoman teknis.
- 4) Tahap penanaman dipengaruhi musim hujan.
- 5) Terdapat pelaksanaan kerjaan tidak sesuai RUKK.

Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai berikut :

- 1). Percepatan pelaksanaan kegiatan setelah terjadi proses penghematan dengan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan yang intensif.
- 2). Pengajuan revisi kegiatan disesuaikan dengan tupoksi satker pelaksana kegiatan.
- 3). Menyarankan agar CPCL dilakukan pada T-1.
- 4). Meningkatkan pengendalian dan monitoring yang intens terhadap RUKK yang disusun untuk kegiatan perluasan sawah. Terutama karena besarnya total anggaran yang diterima oleh kelompok untuk kegiatan ini.

6). Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi yaitu 'jumlah pupuk bersubsidi' sampai posisi 24 Desember 2014 dari target 9.550.000 ton terealisasi 8.858.069 ton atau 92,75 %. Realisasi tersebut terinci untuk Urea sebanyak 3.979.765 ton atau 97,07 % dari alokasi 4.100.000 ton, SP -36 sebanyak 795.179 ton atau 93,55 % dari alokasi 850.000 ton, ZA sebanyak 971,824 ton atau 92,55 % dari alokasi 1.050.000 ton, NPK sebanyak 2.372.539 ton atau 93,04 % dari alokasi 2.550.000 ton dan pupuk organik sebanyak 738.763 ton atau 73,88 % dari alokasi 1.000.000 ton.

Dari realisasi pupuk bersubsidi khususnya urea untuk tanaman padi dari target 2.232.525 ton (11.162.625 Ha) terealisasi 2.167.055 ton (10.835.273 Ha) atau **97,07 %** dengan kontribusi penambahan produksi padi sejumlah 3.792.346 ton GKP. Capaian ini termasuk kategori **"Berhasil"**.



Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penyaluran pupuk urea bersubsidi untuk tanaman padi, memberikan kenaikan kontribusi dari 3.702.670 ton GKP menjadi 3.792.345 ton GKP atau 89.675 ton GKP (2,36 %). Sementara itu, jika dibandingkan dengan target 4 tahun sampai dengan tahun 2014 sebesar 17.533.490 Ton GKP, posisi capaian kontribusi sampai dengan TA. 2014 ini sudah mencapai 15.767.314 Ton GKP (90,00 %).

Kontribusi kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi selama tahun 2011- 2014 sebagai berikut :

Gambar 7. Kontribusi Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2011- 2014



Sumber data: Renstra dan Hasil pengukuran kinerja Ditjen PSP, 2014

Target capaian belum mencapai 100% disebabkan beberapa hal antara lain :

- 1) Adanya pergeseran musim tanam.
- 2) Masih ditemukan sebagian petani yang belum tergabung dalam kelompok tani dan belum menyusun RDKK.
- 3) Lambatnya Penerbitan Peraturan Bupati/Walikota sebagai dasar Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai berikut :

- 1). Melakukan sosialisasi penyusunan RDKK pupuk bersubsidi dan petani untuk berkelompok.
- 2). Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan Penerbitan Peraturan Bupati/Walikota.



7). Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan pengembangan usaha agribisnis perdesaan yaitu 'jumlah terbentuk dan terfasilitasinya gapoktan PUAP dengan dana stimulus dana penguatan modal usaha' dari target 1.713 Gapoktan (22.878 Ha) terealisasi 1.713 Gapoktan (22.878 Ha) atau 100% dengan kontribusi penambahan produksi padi sejumlah 160.146 ton GKP. Capaian ini termasuk kategori “**Berhasil**”.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan anggaran Rp.330.000.000.000,00 tercapai fasilitasi Gapoktan PUAP sejumlah 3.300 Gapoktan, sedangkan pada tahun 2014 dengan anggaran Rp. 171.300.000.000,00 tercapai fasilitasi Gapoktan PUAP sejumlah 1.713 Gapoktan. Penurunan alokasi anggaran PUAP pada TA. 2014 (jika dibandingkan tahun 2013) menyebabkan terjadinya penurunan pada fasilitasi gapoktan PUAP sejumlah 1.587 gapoktan (21.195 Ha) atau penurunan kontribusi sejumlah 148.367 Ton GKP (**92,64%**). Sementara itu jika dibandingkan dengan target renstra 2011-2014, kontribusi PUAP adalah sebesar 1.796.214 Ton GKP, posisi capaian kontribusi sampai dengan TA. 2014 ini sudah mencapai 1.960.746 Ton GKP (109,16%).

Kontribusi kegiatan pengembangan usaha agribisnis perdesaan selama tahun 2011-2014 sebagai berikut :

Gambar 8. Kontribusi Kegiatan Pengembangan PUAP Tahun 2011-2014



Sumber data: Renstra dan Hasil pengukuran kinerja Ditjen PSP, 2014

Pelaksanaan kegiatan PUAP di tahun 2014 tidak mengalami hambatan, target tercapai 100% untuk fasilitasi 1.713 gapoktan PUAP di 33 provinsi.



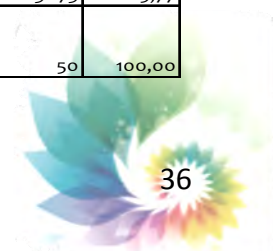
3.1.3.3. Dukungan dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Pertanian

Selain dilaksanakan melalui kegiatan utama yang terkait langsung mendukung penambahan produksi padi, juga dilaksanakan kegiatan yang secara tidak langsung mendukung penambahan produksi padi maupun peningkatan produktivitas di sektor hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kegiatan pendukung tersebut dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel 8. Capaian Kegiatan Pendukung Dalam Peningkatan Produktivitas Pertanian (Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) Tahun 2014

Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan Pendukung	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	* Jumlah Pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui sumur tanah dangkal, air permukaan, sumur tanah dalam)	280	Unit	275	98,21
	* Jumlah Pengembangan/pelaksanaan konservasi air dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim	9600	Unit	9504	99,00
Perluasan dan Pengelolaan Lahan untuk Pertanian	* Jumlah bidang tanah petani yang di Pra sertifikasi dan pasca sertifikasi	64.800	bidang	48.900	75,46
	* Jumlah Perluasan Areal Hortikultura	2.500	Ha	2.450	98,00
	* Jumlah Perluasan Areal Perkebunan	11.000	Ha	10.984	99,85
	* Jumlah Perluasan Areal Peternakan	2.500	Ha	2.470	98,80
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida untuk Pertanian	* Jumlah terbit Permentan tentang Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2015	1	Permentan	1	100,00
	* Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi permentan tahun 2015 tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2015	33	Provinsi	33	100,00
	* Jumlah petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi	1	Pedoman	1	100,00
	* Jumlah Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014	16	Propinsi	16	100,00
	* Jumlah terbangunnya rumah kompos melalui Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	830	Unit	830	100,00
	* Jumlah sampel mutu pupuk yang beredar	50	Sampel	50	100,00
	* Jumlah sampel mutu pestisida yang beredar	50	Sampel	50	100,00
	* Jumlah pendaftaran pupuk	200	ijin	350	175,00
	* Jumlah pendaftaran pestisida	200	ijin	562	281,00
	* Jumlah alat dan mesin pertanian yang efisien dan berkelanjutan di lokasi :				
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian	a. Bantuan Traktor Roda 2	7.581	unit	7.635	100,71
	b. Bantuan Pompa Air	4.100	unit	4.122	100,54
	c. Rice Transplanter	279	unit	279	100,00
	d. Chopper	225	unit	225	100,00
	e. Cultivator	240	unit	240	100,00
Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	Jumlah jenis alsintan yang diawasi di lokasi	10	unit	10	100,00
	* Jumlah Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) sebesar Rp. 2 trilyun.	2	Trilyun	1,764	88,20
	* Jumlah Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian oleh perbankan sebesar Rp. 5 trilyun.	5	Trilyun	7,511	150,22
	* Jumlah model Pelaksanaan 3000 Ha asuransi pertanian	3000	Ha	3.173	105,77
	* Jumlah LKMA meningkat kemampuannya dalam mengelola dana BLM PUAP melalui pelatihan	50	LKMA	50	100,00

Sumber data : Ditjen PSP, Kementerian Pertanian, 2014



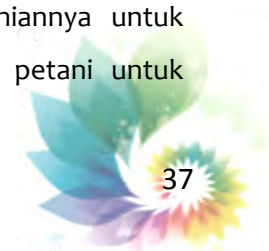
Dari dukungan tersebut diatas, capaian dan kontribusi yang dihasilkan adalah :

a) Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

- 1). Pengembangan sumber air alternative skala kecil di TA. 2014 mencapai 275 unit dari target 280 unit (98,21%), sementara realisasi di TA. 2013 mencapai 297 unit dari target 300 unit.
- 2). Pengembangan/pelaksanaan konservasi air dan lingkungan hidup serta antisipasi anomaly iklim di TA. 2014 mencapai 9.504 unit dari target 9600 unit (99%), sementara realisasi di TA. 2013 mencapai 415 unit dari target 421.unit. Kontribusi dari kegiatan ini adalah dapat menjadi penyedia cadangan air untuk pertanaman pada saat musim kemarau.

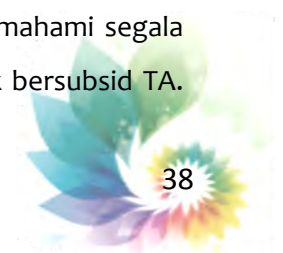
b) Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan untuk Pertanian

- 1). Prasertifikasi dan pasca sertifikasi tanah di TA. 2014 mencapai 48.900 bidang dari target 64.800 bidang (75,46%), sementara realisasi di TA. 2013 mencapai 45.617 bidang dari target 65.000 bidang. Kontribusi dari kegiatan ini diperolehnya data penetapan calon lokasi dan calon petani (CPCL) serta jumlah persil/bidang yang diperuntukan bagi petani dan/atau pemilik penggarap lahan pertanian rakyat yang akan digunakan untuk perencanaan kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) oleh BPN ditahun mendatang; memberikan kepastian kepada petani pemilik penggarap yang telah mengusahakan tanahnya tetapi belum mempunyai hak atas tanah yang tetap (subyek) dan lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di sentra produksi (obyek) atas tanah yang akan disertifikasi secara cepat, tepat, mudah, aman; mempercepat penyajian dokumen administrasi subyek dan obyek untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; mengetahui pemanfaatan sertifikat tanah petani dalam kaitannya dengan usaha pertanian ditinjau dari aspek ekonomi yaitu sertifikat hak milik tersebut dapat digunakan sebagai jaminan/agunan dalam memperoleh dan menambah modal usaha tani sehingga motivasi petani untuk berusaha tani di atas lahan pertaniannya sendiri dapat meningkat; mengendalikan laju alih fungsi lahan atau mencegah terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian; insentif yang efektif bagi petani yang bersedia mempertahankan lahan pertaniannya untuk penguatan usaha budidaya pertanian; memberikan jaminan pada petani untuk

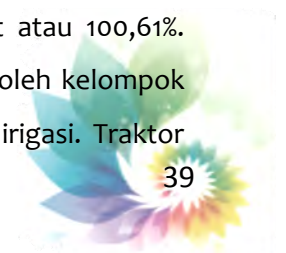


melakukan usaha budidaya pada tanah yang dimilikinya; dan menambah nilai jual tanah petani.

- 2). Perluasan areal hortikultura di TA. 2014 mencapai 2.450 Ha dari target 2.500 Ha (98%), sementara realisasi di TA. 2013 mencapai 2.020 Ha dari target 2.040 Ha. Kontribusi dari kegiatan ini diperkirakan dapat meningkatkan areal tanam komoditas hortikultura, meningkatkan produksi komoditas hortikultura unggulan nasional dan lokal, tersedianya produk hortikultura yang berkualitas, serta terbentuknya kawasan sentra produksi hortikultura yang berwawasan agribisnis.
 - 3). Perluasan areal Perkebunan di TA. 2014 mencapai 10.984 Ha dari target 11.000 Ha (99,7%), sementara realisasi di TA. 2013 mencapai 6.670 Ha dari target 6.720 Ha. Kontribusi dari kegiatan ini diperkirakan dapat meningkatkan areal tanam komoditas perkebunan, meningkatkan produksi komoditas perkebunan unggulan nasional dan lokal, tersedianya produk perkebunan yang berkualitas, serta terbentuknya Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN). Selain itu, kegiatan perluasan areal perkebunan memberikan pengaruh sosial dan ekonomi bagi lingkungan sekitar karena menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
 - 4). Perluasan areal Peternakan di TA. 2014 mencapai 2.470 Ha dari target 2.500 Ha (98,80%), sementara realisasi di TA. 2013 mencapai 3.049 Ha dari target 3.049 Ha. Kontribusi dari kegiatan ini diperkirakan dapat meningkatkan tersedianya hijauan makanan ternak dalam jumlah cukup dan berkualitas pada areal peternakan.
- c) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida untuk Pertanian
- 1). Permentan tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2015 telah diterbitkan. Dengan terbitnya permentan ini maka peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi mendukung peningkatan produksi padi telah tersedia. Terbitnya permentan ini memperlancar pelaksanaan pendistribusian pupuk sehingga tersalurkan sesuai jadwal pertanaman.
 - 2). Sosialisasi Permentan tahun 2015 tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2015 telah disosialisasikan di 33 Provinsi. Dengan sosialisasi ini para pelaksana pendistribusi pupuk baik oleh perusahaan, propinsi maupun kabupaten dapat memahami segala ketentuan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi TA. 2015.



- 3). Petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi telah dibuat. Adanya petunjuk pelaksanaan tersebut, memudahkan para petugas pelaksana baik di tingkat kelompok tani, kecamatan, kabupaten dan provinsi serta pusat dalam melaksanakan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan dan sesuai prosedur pembayaran subsidi pupuk.
 - 4). Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi TA. 2014 telah dilaksanakan di 16 Propinsi. Adanya verifikasi dan validasi penyaluran pupuk ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi terhadap penerima manfaat.
 - 5). Pembangunan Unit pengolah Pupuk Organik mencapai 830 unit dari 830 unit (100%). Kontribusi kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan pupuk organik insitu oleh dan untuk petani, utamanya untuk mendukung kegiatan SRI di lokasi setempat atau masyarakat. Selain itu juga menyediakan fasilitasi terpadu untuk pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik), memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian serta melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan.
 - 6). Pendaftaran pupuk sejumlah 200 ijin dan pendaftaran pestisida sejumlah 200 ijin memberikan dukungan kepastian terhadap produk pupuk dan pestisida yang dianjurkan untuk dipergunakan oleh petani. Sehingga petani dapat memiliki kepastian untuk menggunakan produk yang berkualitas untuk pertanaman yang diusahakan.
 - 7). Penerbitan sampel mutu pupuk sejumlah 50 sampel dan sampel mutu pestisida sejumlah 50 sampel memberikan dukungan kepastian/jaminan mutu dan efektivitas pupuk dan pestisida yang dipergunakan oleh petani, sehingga petani dapat memiliki kepastian untuk menggunakan produk yang berkualitas untuk pertanaman yang diusahakan yang pada akhirnya mampu meningkatkan produksi pertanian
- d) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan
- 1). Penyediaan alsintan TA. 2014 melalui bantuan alsin traktor roda 2 (7.581 unit), pompa air (4.100 unit), Rice transplanter (279 unit), Chopper (225 unit) dan cultivator (240 unit), secara total keseluruhan mencapai 12.501 unit dari target 12.425 unit atau 100,61%. Kontribusi dari kegiatan ini adalah meningkatkan kepemilikan alsintan oleh kelompok tani/UPJA untuk mempercepat pengolahan tanah dan penyediaan air irigasi. Traktor



roda 2 akan dapat mengolah lahan pertanian seluas 152.700 ha, pompa air akan dapat mengairi lahan pertanian seluas 103.050 Ha, Rice Transplanter akan dapat menanam padi seluas 15.066 Ha, Cultivator dapat mengolah lahan hortikultura seluas 5.760 Ha dan Chopper dapat mencacah pakan ternak sebanyak 121.500 ton.

- 2). Pengawasan alsintan sejumlah 10 jenis di lokasi juga dilaksanakan untuk melindungi petani dari peredaran alat dan mesin pertanian yang tidak memenuhi syarat/standar.

e) Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

Pelayanan pembiayaan pertanian dan pengembangan usaha agribisnis perdesaan dilaksanakan dalam rangka mempermudah akses petani terhadap pembiayaan. Pelayanan pembiayaan dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai mitra dalam bentuk KKPE, KUR, asuransi pertanian dan peningkatan kemampuan petani dalam mengelola dana BLM PUAP.

- 1). Penyaluran kredit ketahanan pangan dan energy (KKPE) oleh perbankan terealisasi sebesar 1,764 triliun (22,9% dari rencana tahunan penyaluran/RTP sebesar 7,688 triliun) atau 83,57% jika dibandingkan dengan komitmen BANK Rp. 9,200 triliun.
- 2). Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR sektor pertanian) oleh perbankan tahun 2014 (Januari-Desember) sebesar 7,511 triliun atau 20,05% dari total penyaluran KUR semua sektor sebesar 37,470 triliun
- 3). Pada tahun 2014 telah terlaksana model asuransi pertanian pada luasan 3.173 Ha. Asuransi pertanian ini ditujukan untuk petani yang mengalami kegagalan dalam usaha tani padi disebabkan oleh iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit tumbuhan/OPT yang kesemuanya merugikan petani. program ini memberikan kontribusi positif kepada petani dengan tersedianya modal kerja petani (untuk membeli saprodi, dan biaya tenaga kerja) untuk penanaman padi pada musim berikutnya).
- 4). Untuk peningkatan kemampuan SDM Gapoktan sebagai pengelola dana BLM-PUAP pada tahun 2014 ini, telah dilaksanakan pelatihan terhadap 50 LKMA. Dengan kemampuan yang baik dalam pengelolaan dana BLM PUAP, akan menciptakan keberlanjutan perguliran dana untuk pengembangan usaha agribisnis pertanian di perdesaan.

Selama periode 2011-2014, capaian pelaksanaan kegiatan pendukung tersebut sebagai berikut :



Tabel 9. Capaian Kegiatan Pendukung Dalam Peningkatan Produktivitas Pertanian (Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) Terhadap Target Renstra

Indikator Sasaran Kegiatan Pendukung		Target Renstra 2011-2014	Realisasi				TOTAL	% Capaian terhadap Target Renstra
			2011	2012	2013	2014		
*	Jumlah Pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui sumur tanah dangkal, air permukaan, sumur tanah dalam) (unit)	2.860	680	1578	297	275	2.830	98,95
*	Jumlah Pengembangan/pelaksanaan konservasi air dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim (unit)	14.731	3140	1561	415	9504	14.620	99,25
*	Jumlah bidang tanah petani yang di Pra sertifikasi dan pasca sertifikasi (bidang)	281.400,00	34.941,00	48.285,00	45.617,00	29.160,00	158.003,00	56,15
*	Jumlah Perluasan Areal Hortikultura (Ha)	19.879	10.604	4.115	2.020	2.450	19.189	96,53
*	Jumlah Perluasan Areal Perkebunan (Ha)	51.326	24.200	8.878	6.670	10.984	50.732	98,84
*	Jumlah Perluasan Areal Peternakan (Ha)	12.315	5.430	3.145	3.029	2.470	14.074	114,28
*	Jumlah terbit Permentan tentang Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2015 ^{*)}	1				1		
*	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi permentan tahun 2015 tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2015 ^{*)}	33				33		
*	Jumlah petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi ^{*)}	1				1		
*	Jumlah Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014 (Propinsi) ^{*)}	16				16		
*	Jumlah terbangunnya rumah kompos (melalui Unit Pengolahan Pupuk Organik /UPPO dan RPPO) (unit)	2795	1134	100	359	830	2794	99,96
			241		130			
*	Jumlah sampel mutu pupuk yang beredar (sampel)	50	50	50	50	50		
*	Jumlah sampel mutu pestisida yang beredar (sampel)	50	50	50	50	50		
*	Jumlah pendaftaran pupuk (ijin)	200	548	311	342	350		
*	Jumlah pendaftaran pestisida (ijin)	200	378	346	343	562		
*	Jumlah alat dan mesin pertanian yang efisien dan berkelanjutan di lokasi :(unit)	22.255	1.346	2.157	6.515	12.501	22.529	101,23
	a. Bantuan Traktor Roda 2		752	1.507	3.996	7.635	13.890	
	b. Bantuan Pompa Air		410	600	2.002	4.122	7134	
	c. Rice Transplanter		174	0	153	279	606	
	d. Chopper		0	0	154	225	379	
	e. Cultivator		0	0	200	240	440	
	f. Bantuan Traktor Roda 4		10	50	0	0	60	
	Jumlah jenis alsintan yang diawasi di lokasi (unit)	24	0	0	10	10	20	83,33
*	Jumlah Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) (Trilyun)	9	2,197	3,842	2,541	1,764	10,344	114,93
*	Jumlah Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian oleh perbankan (Trilyun **)	20	4,188	5,886	7,763	7,512	25,349	126,75
*	Jumlah model Pelaksanaan asuransi pertanian (Ha)	3000		450	1500	3173	5123	170,77
*	Jumlah LKMA meningkat kemampuannya dalam mengelola dana BLM PUAP melalui pelatihan (LKMA)	500	25	300	50	50	425	85,00

Ket : *) Target tidak tercantum dalam renstra 2011-2014, tetapi merupakan target PK

**) Relisasasi KUR untuk Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan

Sumber data : Ditjen PSP, Kementerian Pertanian, 2014



3.1.3.4 Dukungan Manajemen dalam Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian

Dalam upaya mencapai sasaran strategis Ditjen PSP, selain dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang secara teknis ditujukan untuk memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas pertanian, juga dilaksanakan kegiatan berupa dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya baik di pusat maupun daerah.

Untuk pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen di pusat, telah tercapai sebagai berikut :

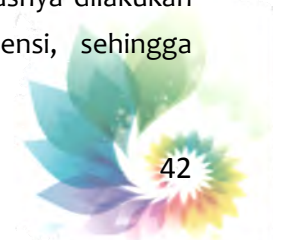
Tabel 10. Capaian Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	% Capaian
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	*	Jumlah Dokumen perencanaan program, anggaran dan kerjasama (Renja KL, RKAKL, DIPA, POK, MOU Kerjasama, TOR)	6	6	Dokumen	100
	*	Jumlah administrasi Keuangan dan Perlengkapan	33	33	Provinsi	100
	*	Jumlah SAK dan SIMAK BMN	33	33	Provinsi	100
	*	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) tata laksana kepegawaian	4	4	Dokumen	100
	*	Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan prasarana dan sarana pertanian	45	45	Dokumen	100
	*	Jumlah informasi prasarana dan sarana pertanian yang dipublikasikan	6	6	Leaflet	100
	*	Jumlah dukungan prasarana dan sarana kerja untuk Direktorat Jenderal	1	1	Paket	100
	*	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan	5	5	Laporan	100
	*	Jumlah laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan audit (LHP dan LHA)	4	4	Dokumen	100

Sumber data : Ditjen PSP, Kementerian Pertanian, 2014

Kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mengatur dan mengarahkan agar penggunaan segala sumber daya berjalan secara efisien dan efektif, yang pelaksanaannya meliputi mulai dari proses perencanaan hingga implementasi kegiatan diantaranya melalui ; 1). Penerbitan pedoman, 2). Sosialisasi pedoman, 3). Pembentukan Tim Teknis di Kabupaten sebagai sarana pendampingan, supervisi dan advokasi bagi kelompok tani.

Namun pada implementasinya, masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia di daerah baik dari segi kuantitas maupun kompetensi sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan. Sebagai upaya yang serius, sudah seharusnya dilakukan penambahan kuantitas sumber daya di daerah yang memiliki kompetensi, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi efisien dan efektif.



3.2. Realisasi Anggaran

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapat dukungan anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 3.195.251.400.000,00. Pada Bulan Juni 2014 mengalami penghematan anggaran, sehingga dukungan anggaran menjadi Rp. 2.715.885.667.000,00. Pada Bulan Desember 2014 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mendapatkan alokasi anggaran tambahan melalui dana contingencies sebesar Rp. 578.145.076.000,00, sehingga alokasi anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2014 menjadi sebesar **Rp. 3.294.030.743.000,00**. Anggaran tersebut terbagi atas Dana Tugas Pembantuan sebesar **Rp. 2.388.791.543.000,00**, Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. **69.929.730.000,00** dan dana satker pusat sebesar **Rp. 835.309.470.000,00**.

Realisasi Anggaran Dana Kontingencies

Pada Bulan Desember 2014 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mendapatkan alokasi anggaran tambahan melalui dana contingencies sebesar Rp. 578.145.076.000,00. Alokasi anggaran melalui dana contingencies ini dialokasikan pada 13 propinsi sentra produksi pangan melalui kegiatan : 1). percepatan optimasi lahan sawah seluas 170.000 Ha dengan anggaran Rp. 574.116.578.000,00 yang dilaksanakan melalui penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian terdiri dari : pupuk NPK dan Urea, Benih Padi, Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), 2). pendampingan oleh penyuluh dan TNI.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dari target fisik Percepatan Optimasi Lahan sebesar 170.000 Ha secara nasional realisasi fisik mencapai 78.698 Ha atau sekitar 46,29 %. Sedangkan secara keseluruhan realisasi mencapai 53,45 %, dan realisasi kegiatan berdasarkan nilai kontrak, sudah mencapai 100 %.

Tabel 11. Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan melalui Dana Kontingencies Tahun 2014

NO	FISIK/PENGADAAN	SATUAN	PLAFOND		KONTRAK PENGADAAN			REALISASI PENYALURAN		
			ANGGARAN (Rp)	VOLUME	KONTRAK	VOLUME	%	RP	VOLUME	%
	<i>Luas Areal</i>	Ha		170,000		78,698	46.29		78,698	100.00
1	Benih	Kg	41,225,002,000	4,250,000	18,303,599,875	1,966,650	44.40	18,303,599,875	1,966,650	100.00
2	Pupuk Urea	Kg	164,737,480,000	34,000,000	75,455,116,300	15,707,200	45.80	75,455,116,300	15,707,200	100.00
3	Pupuk NPK	Kg	164,737,480,000	22,799,700	56,200,438,625	10,034,850	34.12	56,200,438,625	10,034,850	100.00
4	Traktor Roda Dua	Unit	174,275,384,000	7,800	132,216,216,000	6,217	75.87	132,216,216,000	6,217	100.00
5	Pompa Air	Unit	59,090,090,000	3,000	37,778,785,000	2,093	63.93	37,778,785,000	2,093	100.00
6	Transplanter	Unit	6,171,280,000	100	4,050,640,000	66	65.64	4,048,640,000	66	100.00
	Total		574,116,578,000		324,004,795,800		56.44	324,002,795,800		

Sumber data : Ditjen PSP, Kementerian Pertanian, 2014

Realisasi Total Anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Secara total sampai dengan 31 Desember 2014, realisasi penyerapan anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebesar **Rp. 2.906.498.744.446,00** dari target anggaran **Rp. 3.294.030.743.000,00** atau sebesar **88,24%**. Realisasi anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selengkapnya sebagai berikut :

1). Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Tabel 12. Daftar Pagu dan Realisasi Ditjen PSP

No.	SATKER	PAGU	REAL. PENYERAPAN	
			Rp	%
1.	Pusat	835.309.470.000	760.442.745.877	91,07
2.	Dekonsentrasi	69.929.730.000	61.797.247.902	88,37
3.	Tugas Pembantuan	2.388.791.543.000	2.084.258.750.667	87,25
	JUMLAH	3.294.030.743.000	2.906.498.744.446	88,24

Sumber data : Ditjen PSP, Kementerian Pertanian, 2014

2). Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian per Eselon II

Tabel 13. Daftar Pagu dan Realisasi Anggaran per-Eselon II

No	Unit Eselon II	Pagu	Realisasi	%
1.	Setditjen PSP	102.194.929.000	63.505.703.691	62,14
2.	Dit. Perluasan dan Pengelolaan Lahan	11.560.917.000	9.683.560.540	83,76
3.	Dit. Pengelolaan Air Irigasi	30.082.560.000 *)	13.019.904.247	43,28
4.	Dit. Pembiayaan Pertanian	228.042.484.000	222.126.277.691	97,41
5.	Dit. Pupuk dan Pestisida	175.513.500.000	172.921.260.883	98,52
6.	Dit. Alat dan Mesin Pertanian	287.915.080.000	279.186.038.825	96,97
	JUMLAH	835.309.470.000	760.442.745.877	91,07

Ket : *) Terdiri dari RM dan RK-RMP

Sumber data : Ditjen PSP, Kementerian Pertanian, 2014



3). Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian

Tabel 14. Daftar Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatan		Sub Kegiatan	Target (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	% Capaian
Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	*	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	446.810.000	443.836.000	99,33
	*	Pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif)	40.000.000	39.840.000	99,60
	*	Pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui sumur tanah dangkal, air permukaan, sumur tanah dalam)	16.800.000	16.500.000	98,21
	*	Pengembangan/pelaksanaan konservasi air dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim	24.000.000	23.920.000	99,67
Perluasan dan Pengelolaan Lahan untuk Pertanian	*	Perluasan Sawah	292.338.000	292.338.000	100,00
	*	Pengembangan Optimasi Lahan	352.546.700	349.003.910	99,00
	*	Pengembangan Metode SRI	334.876.000	333.473.000	99,58
	*	Pra sertifikasi dan pasca sertifikasi	12.960.000	8.995.902	69,41
	*	Perluasan Areal Hortikultura	17.500.000	17.150.000	98,00
	*	Perluasan Areal Perkebunan	77.000.000	76.888.000	99,85
	*	Perluasan Areal Peternakan	17.500.000	17.290.000	98,80
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida untuk Pertanian	*	Penyaluran pupuk bersubsidi *)	21.047.254.086	19.894.445.413	94,52
	*	Pembangunan rumah kompos melalui Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	166.000.000	166.000.000	100,00
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian	*	Pengadaan alat dan mesin pertanian			
		a. Bantuan Traktor Roda 2	170.642.250	166.738.068	97,71
		b. Bantuan Pompa Air	84.913.200	81.602.805	96,10
		c. Rice Transplanter	17.669.070	17.566.716	99,42
		d. Chopper	4.800.600	4.740.675	98,75
		e. Cultivator	3.240.000	3.228.550	99,65
Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	*	Penyaluran dana BLM PUAP	171.300.000	171.300.000	100,00

Ket : *) Anggaran yang terserap sampai dengan tagihan subsidi bulan November 2014. Terhadap tagihan subsidi bulan Desember 2014 pembayaran subsidi pupuk akan dilakukan sampai dengan minggu kedua Februari 2015 melalui mekanisme pencadangan subsidi pupuk

Sumber data : Ditjen PSP, Kementerian Pertanian, 2014



Efisiensi Penggunaan Anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Realisasi anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp. 2.906.498.744.446,00 dari target Rp. 3.294.030.743.000,00 (88,24%), sebagian besar dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana pertanian di daerah melalui tugas pembantuan dan pengadaan alsintan secara e-catalog. Mekanisme pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dilakukan secara bantuan sosial (bansos), sehingga tercapai efisiensi penggunaan anggaran melalui : 1). Tidak adanya unsur pengambilan keuntungan dari anggaran bansos yang diserahkan, 2). Adanya potensi penambahan volume pekerjaan dari volume yang ditargetkan melalui swadaya masyarakat/petani. Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran juga tercapai melalui diterapkannya pengadaan alsintan secara e-catalog. Dengan sistem e-catalog ini telah disepakati perjanjian antara LKPP dan pengusaha terkait adanya jaminan dari pengusaha bahwa harga alsintan yang diusulkan dalam e-catalog adalah lebih rendah dari harga pasar.

3.3. Hambatan Dan Kendala

Pelaksanaan kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian tahun 2014 masih mengalami hambatan/kendala, sehingga pencapaian target sasaran strategis belum 100% tercapai. Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka perlu diketahui faktor yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Kendala Administrasi

- 1) Kebijakan anggaran nasional yang mengharuskan adanya penghematan anggaran di tahun berjalan, sehingga mengakibatkan adanya revisi DIPA/POK, relokasi kegiatan dan keterlambatan pencairan dana.
- 2) Sinergitas dan koordinasi program/kegiatan lintas sektor belum berjalan optimal.
- 3) Terjadinya perubahan struktur organisasi di beberapa satker daerah pelaksana kegiatan sehingga terjadi perubahan pejabat pelaksana kegiatan seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara yang menyebabkan kegiatan tidak bisa segera dilaksanakan.
- 4). Dalam persiapan administrasi khususnya dalam penyusunan RUKK masih kurang cermat.
- 5) Masih lemahnya sistem pengendalian kegiatan.



- 6) Lambatnya penerbitan peraturan Bupati/Walikota yang menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan (sebagai contoh lambatnya penerbitan peraturan Bupati/Walikota yang menjadi dasar Penyaluran Pupuk Bersubsidi).

2. Kendala Teknis

- 1) Masih terbatasnya data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan (data base riil lahan yang layak dikembangkan untuk kegiatan perluasan sawah, *road map* pengembangan kawasan tanaman pangan yang integral)
- 2) Keterlambatan dalam menetapkan calon lokasi dan kelompok tani penerima kegiatan di beberapa daerah yang disebabkan kesulitan dalam memilih lokasi dan petani yang sesuai dengan pedoman teknis.
- 3) Adanya realokasi kegiatan ke kabupaten lain karena lokasi yang di tetapkan termasuk lahan pengembangan pembangunan pada kawasan dari sumber dana APBD kabupaten.
- 4) Adanya pengaruh faktor alam (iklim) yang mempengaruhi tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi atau tanam sehingga penyelesaian kegiatan terlambat
- 5) Terdapat pelaksanaan kerjaan yang masih belum sesuai RUKK.

3.4. Upaya dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka diperlukan upaya tindak lanjut dan tindakan antisipatif ke depan sebagai berikut :

1. Aspek Administratif

- 1) Percepatan pelaksanaan kegiatan setelah terjadi proses penghematan dengan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan yang intensif.
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk sinergitas pelaksanaan kegiatan.
- 3) Meningkatkan sistim monitoring dengan instrument yang lebih sesuai untuk pendataan sesuai kebutuhan.
- 4) Dalam melakukan pembinaan agar lebih ditekankan terhadap sosialisasi penyusunan RUKK / RDKK.
- 6). Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan Penerbitan Peraturan Bupati/Walikota.



- 7). Mengoptimalkan sistem pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini.

2. Aspek Teknis

- 1) Mendorong pemerintah daerah agar menaruh perhatian serius terhadap pengembangan kawasan dan menyusun perencanaan detil dalam wujud road map yang dijadikan acuan dalam perencanaan tahunan nantinya.
- 2) Dalam pembinaan ke daerah menekankan agar identifikasi calon petani dan calon lokasi dapat dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga proses penyelesaian administrasi kegiatan dapat dipercepat.
- 3) Meningkatkan pembinaan untuk pelaksanaan kegiatan teknis sesuai pedoman yang telah ditentukan dan RUKK yang telah dibuat. Apabila ada perubahan, agar dapat segera merevisi RUKK.
- 4) Meningkatkan persiapan antisipatif terhadap pengaruh iklim dalam pelaksanaan kegiatan, dengan mengatur rencana pelaksanaan seefektif mungkin.



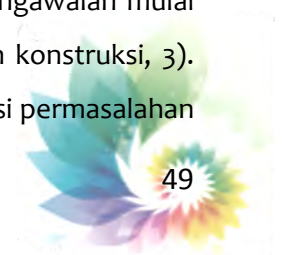
BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka dalam rangka mendukung pencapaian empat target sukses Kementerian Pertanian telah disusun Rencana Strategis dan Program Kerja Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian 2011 – 2014. Renstra dimaksud menjadi acuan dalam pencapaian sasaran strategis Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, disampaikan dalam Laporan Kinerja Ditjen PSP. Dalam Laporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Pencapaian 1 sasaran strategis Ditjen PSP tahun 2014 yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yaitu meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, dengan indikator kinerja utama “Jumlah penambahan produksi padi” dapat dikategorikan **“Berhasil”**. Capaian “Jumlah penambahan produksi padi” dimaksud sebesar **5.509.493 Ton GKP dari target 5.740.609 Ton GKP (95,97%)**. Sementara itu jika dibandingkan dengan target renstra 2011-2014, target capaian penambahan produksi padi adalah sebesar **25.695.221 Ton GKP dengan rata-rata penambahan pertahun sebesar 6.423.805 Ton GKP, sedangkan sampai dengan TA. 2014 telah tercapai kontribusi sebesar 24.053.747 Ton GKP (93,61%) dengan rata-rata penambahan pertahun sebesar 6.013.437 Ton GKP**.

Untuk itu masih perlu diupayakan perbaikan untuk mengatasi kendala teknis dan administrasi yang dihadapi. Sebagai upaya untuk perbaikan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian ke depan, maka perlu dilakukan langkah nyata mulai dari proses perencanaan hingga implementasi pelaksanaan kegiatan di lapang melalui : 1). Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan, 2). Peningkatan sosialisasi, pembinaan dan pengawalan mulai dari pemberkasan bansos, penyusunan RUKK, transfer dana dan pelaksanaan konstruksi, 3). Peningkatan sistim monitoring dan pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan



dan solusinya sejak dini serta 4). Peningkatan koordinasi dan dukungan seluruh *stakeholders* baik di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian, dan 5). Peningkatan tindakan preventif dan antisipasi terhadap kondisi perubahan iklim yang terjadi.



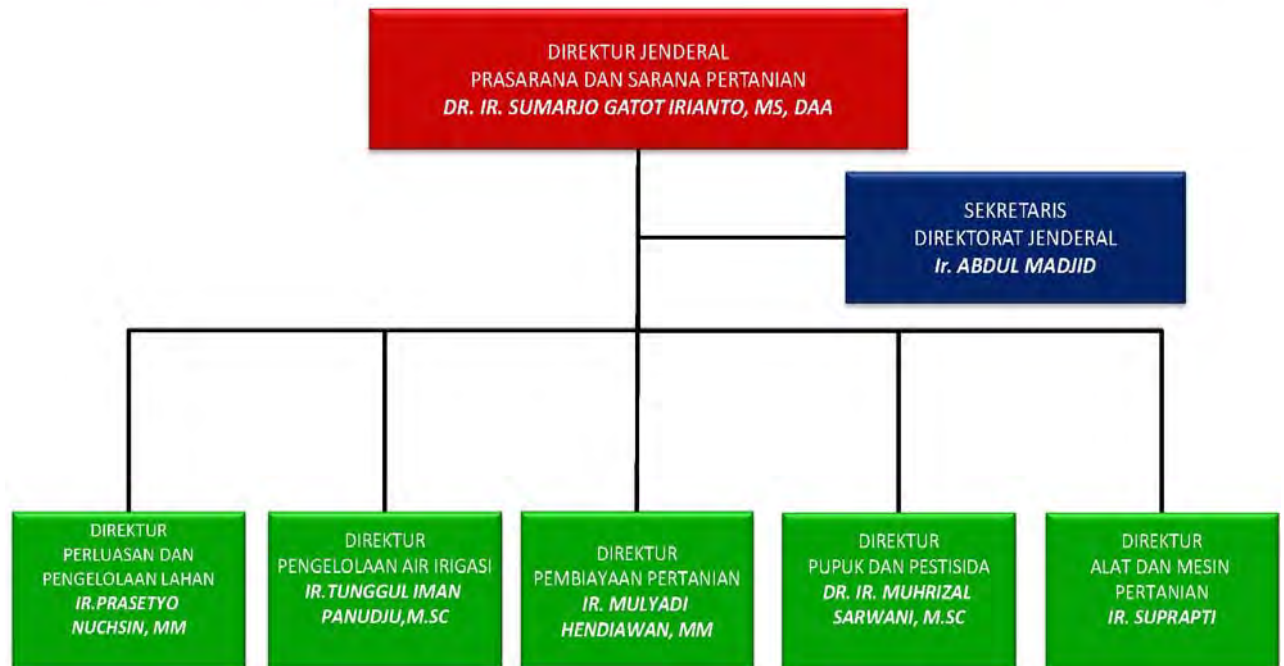
Lampiran – Lampiran

1. Struktur Organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Jumlah Pegawai Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;
3. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;
5. Penetapan Kinerja (PK) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;
(PK Sebelum dan PK Revisi)
6. Target Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2011 – 2014 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dalam Review Renstra Ditjen PSP Tahun 2011 – 2014.



Lampiran 1.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN



Lampiran 2.

JUMLAH PEGAWAI DITJEN PRASARANA & SARANA PERTANIAN TA. 2014

NO	UNIT KERJA	IIA	IIB	IIC	IID	GoI II	IIIA	IIIB	IIIC	IIID	GoI III	IVA	IVB	IVC	IVD	IVE	GoI IV	JUMLAH
1	DITJEN PRASARANA & SARANA PERTANIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
2	SEKRETARIAT DITJEN PSP	0	2	10	2	14	13	26	11	10	60	6	1	1	0	0	8	82 *)
3	DIREKTORAT PERLUASAN & PENGELOLAAN LAHAN	0	1	6	3	10	7	13	9	11	40	5	3	1	0	0	9	59
4	DIREKTORAT PENGELOLAAN AIR IRIGASI	0	4	2	5	11	9	15	11	8	43	6	3	1	0	0	10	64
5	DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN	0	0	3	0	3	4	14	4	12	34	5	2	1	0	0	8	45
6	DIREKTORAT PUPUK & PESTISIDA	0	0	5	0	5	8	11	16	8	43	3	3	0	1	0	7	55
7	DIREKTORAT ALAT & MESIN PERTANIAN	1	1	3	0	5	4	11	5	4	24	3	2	1	0	0	6	35
TOTAL PEGAWAI DITJEN PSP		1	8	29	10	48	45	90	56	53	244	28	14	5	1	1	49	341

Ket : *) Belum termasuk Dirjen dan Sesditjen PSP

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ditjen PSP Tahun 2014



Lampiran 3.

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEN PSP TA. 2014

Unit Kerja : Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Tahun : 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Dicapai melalui Kegiatan Utama	Target Setahun		Rencana Aksi Triwulan			
	Indikator Kinerja Outcome		Volume	Satuan	B03	B06	B09 (setelah penghematan)	B12 (setelah penghematan)
Meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	Jumlah penambahan produksi padi		5.740.609	Ton GKP	992.221	2.296.244	4.502.487	5.740.609
		Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	446.810	Ha	1). Teridentifikasinya CPCL seluas 100.000 Ha 2). Diterbitkannya Pedoman PJI 3). Sosialisasi 4). Pembinaan dan Pengawasan kegiatan 5). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 1	1) Teridentifikasinya CPCL seluas 250.000 Ha 2) Tertransferynya dana untuk Pengembangan Jaringan Irigasi seluas 150.000 Ha 3) Terlaksananya pengembangan jaringan irigasi seluas 100.000 Ha 4). Pembinaan dan Pengawasan 5). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 2	1) Teridentifikasinya CPCL seluas 446.810 Ha 2) Tertransferynya dana untuk Pengembangan Jaringan Irigasi seluas 275.000 Ha 3) Terselaikannya pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi seluas 375.000 Ha 4). Pembinaan dan Pengawasan 5). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 3	1) Tertransferynya dana untuk Pengembangan Jaringan Irigasi seluas 446.810 Ha 2) Terselaikannya pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi seluas 446.810 Ha 3). Pembinaan dan Pengawasan 4). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 4 5). Penyusunan Laporan
		Pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif)	500	pkt	1). Teridentifikasinya CPCL untuk 150 paket 2). Diterbitkannya Pedoman Pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air 3). Sosialisasi 4). Pembinaan dan Pengawasan kegiatan 5). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 1	1) Teridentifikasinya CPCL untuk 300 paket 2). Tertransferynya dana untuk Pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air untuk 150 paket 3) Terlaksananya pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air sebanyak 150 paket 4). Pembinaan dan Pengawasan 5). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 2	1) Teridentifikasinya CPCL untuk 500 paket 2). Tertransferynya dana untuk Pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air untuk 300 paket 2) Terlaksananya pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air sebanyak 300 paket 3). Pembinaan dan Pengawasan 4). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 3	1) Tertransferynya dana untuk Pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air untuk 500 paket 2).Terlaksananya pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air sebanyak 500 paket 3). Pembinaan dan Pengawasan 4). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 4 5). Penyusunan Laporan
		Perluasan sawah 2013 (Carry Over)	39.800	Ha	Pemantauan, Pengendalian dan evaluasi	Pemantauan, Pengendalian dan evaluasi	1) Tersedianya lahan perluasan sawah 2013 seluas 39.800 ha 2)Pemantauan, Pengendalian dan evaluasi	1) Tersedianya lahan perluasan sawah 2013 seluas 39.800 ha 2)Pemantauan, Pengendalian dan evaluasi
		Perluasan sawah 2014	29.282	Ha	1) Teridentifikasinya CPCL seluas 10.000 Ha 2). Diterbitkannya Pedoman Perluasan Sawah 3). Sosialisasi 4). Pembinaan dan Pengawasan kegiatan 5). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 1	1) Teridentifikasinya CPCL seluas 29.282 Ha 2) Tertransferynya dana Perluasan Sawah seluas 10.000 Ha 3). Pembinaan dan Pengawasan 4). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 2	1) Tertransferynya dana Perluasan Sawah seluas 24.000 Ha 2) Terbukanya lahan perluasan sawah 2014 seluas 15.000 Ha 3). Pembinaan dan Pengawasan 4). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 3	1) Tertransferynya dana Perluasan Sawah seluas 29.282 Ha 2) Terbukanya lahan perluasan sawah 2014 seluas 29.282 Ha 3). Pembinaan dan Pengawasan 4). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Dicapai melalui Kegiatan Utama	Target Setahun		Rencana Aksi Triwulan			
	Indikator Kinerja Outcome		Volume	Satuan	B03	B06	B09 (setelah penghematan)	B12 (setelah penghematan)
		Pengembangan Optimasi Lahan pertanian tanaman pangan	147.394	Ha	1) Teridentifikasinya CPCL seluas 73.697 Ha 2) Diterbitkannya Pedoman Optimasi Lahan 3). Sosialisasi 4). Pembinaan dan Pengawasan kegiatan 5). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 1	1) Teridentifikasinya CPCL seluas 147.394 Ha 2) Tertransferynya dana Optimasi Lahan seluas 73.697 Ha 3). Pembinaan dan Pengawasan 4). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 2	1). Tertransferynya dana optimasi lahan seluas 147.394 Ha 3) Terlaksananya optimasi lahan seluas 147.394 Ha 4). Pembinaan dan Pengawasan 5). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 3	1). Terlaksananya pengembangan optimasi lahan pertanian tanaman pangan seluas 147.394 ha 2). Pembinaan dan Pengawasan 3). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 4 4). Penyusunan Laporan
		Pengembangan Metode SRI (System of Rice Intensification)	167.438	Ha	1) Teridentifikasinya CPCL seluas 83.719 Ha 2). Diterbitkannya Pedoman Pengembangan SRI 3). Sosialisasi 4). Pembinaan dan Pengawasan kegiatan 5). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 1	1) Teridentifikasinya CPCL seluas 167.438 Ha 2) Tertransferynya dana Pengembangan SRI seluas 83.719 Ha 3) Terlaksananya Pengembangan SRI seluas 83.719 Ha 3). Pembinaan dan Pengawasan 4). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 2	1). Tertransferynya dana Pengembangan SRI seluas 167.438 Ha 3) Terlaksananya Pengembangan SRI seluas 167.438 Ha 4). Pembinaan dan Pengawasan 5). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 3	1). Terlaksananya Pengembangan Metode SRI (System of Rice Intensification) seluas 167.438 ha. 2). Pembinaan dan Pengawasan 3). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 4 4). Penyusunan Laporan
		Penyaluran pupuk bersubsidi Urea untuk komoditas padi	3.906.919	Ha	1). Diterbitkannya petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi 2). Tersosialisasinya pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di 8 Provinsi 3). Pembinaan dan Pengawasan kegiatan 4). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 1	1). Tersosialisasinya pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di 12 Provinsi 2). Tersalurkannya pupuk bersubsidi Urea untuk komoditas padi sejumlah 1.953.460 ton 3). Pembinaan dan Pengawasan kegiatan 4). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 2	1). Tersosialisasinya pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di 16 Provinsi 2). Tersalurkannya pupuk bersubsidi Urea untuk komoditas padi sejumlah 3.125.535 ton. 3). Pembinaan dan Pengawasan kegiatan 4). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 4	1) Tersusunnya laporan hasil verifikasi dan pemantauan penyaluran pupuk bersubsidi di 16 Provinsi 2). Tersalurkannya pupuk bersubsidi Urea untuk komoditas padi sejumlah 3.906.919 ton. 3). Tersusunnya Permentan tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2015 4). Pembinaan dan Pengawasan kegiatan 5). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 4 6) Penyusunan Laporan
		Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	1.713	Gapoktan	1). Diterbitkannya Pedoman PUAP 2014 melalui Permentan 2). Sosialisasi 3). Pembinaan dan Pengawasan kegiatan 4). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 1	1). Diterbitkannya Daftar Nominasi Sementara (DNS) Gapoktan penerima BLM-PUAP sejumlah 1000 gapoktan 2). Pembinaan dan Pengawasan 3). Pengendalian dan Evaluasi triwulan 2	1) Diterbitkannya Daftar Nominasi Sementara (DNS) Gapoktan penerima BLM-PUAP sejumlah 1.713 Gapoktan 2). Pelatihan pengelolaan LKM-A sebanyak 50 Gapoktan 3) Tersalurkannya dana BLM-PUAP ke 500 Gapoktan. 4) Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Triwulan 3	1). Tersalurkannya dana BLM-PUAP sejumlah 1.713 Gapoktan 2). Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program PUAP 3). Terbentuknya 50 LKM-A yang berasal dari Gapoktan penerima PUAP 4) Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Triwulan 4 5). Penyusunan Laporan

Ket : Rencana Aksi dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebijakan pada tahun berjalan

Sumber : Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, 2014



LAMPIRAN 4.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TAHUN 2014



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN
TA. 2014**



**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2013**

KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dengan di susunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 ini di harapkan pencapaian target dan komitmen kinerja yang akan dicapai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tahun 2014 dapat lebih efektif dan terukur.

Jakarta, Maret 2013

Direktur Jenderal,



Sumarjo Gatot Irianto

KATA PENGANTAR

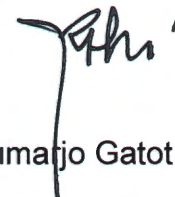
Untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dengan di susunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 ini di harapkan pencapaian target dan komitmen kinerja yang akan dicapai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tahun 2014 dapat lebih efektif dan terukur.

Jakarta, Maret 2013

Direktur Jenderal,


Sumarjo Gatot Irianto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sasaran	2
1.4. Dasar Hukum	3
BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	4
2.1. Visi dan Misi	4
2.2. Tujuan dan Sasaran	5
2.3. Strategi	7
2.4. Kebijakan	10
BAB III PERENCANAAN PROGRAM	11
3.1. Program dan Penjabaran Program ke Dalam Kegiatan	11
3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan	12
BAB IV PENUTUP	14
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN	15

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir ini, kondisi prasarana dan sarana pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian, seperti antara lain meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, perubahan iklim global, kecilnya status kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, dan kurangnya penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga), serta masih rendahnya pemanfaatan potensi alat dan mesin pertanian, maka pembangunan pertanian khususnya target peningkatan produksi dan produktivitas pertanian kedepan masih diperlukan adanya dukungan prasarana dan sarana pertanian, melalui pengelolaan lahan dan air, peningkatan akses permodalan bagi petani, penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat serta peningkatan pemanfaatan dan fasilitasi penyediaan alat mesin pertanian.

Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian difokuskan untuk mendukung pembangunan empat sub sektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Selanjutnya berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu substansi dari penyusunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

Dalam SAKIP dokumen perencanaan yang harus diwujudkan secara terintegrasi adalah rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari renstra memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya, rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam LAKIP.

1.2. Maksud dan Tujuan

RKT Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2014 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang meliputi aspek lahan dan air, pembiayaan, pupuk pestisida dan alat mesin pertanian (Alsintan).

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2014 adalah tersusunnya RKT Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas pokoknya terkait merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang prasarana dan sarana pertanian, koordinasi, manajemen, dan administrasi.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah:

1. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2011-2014.

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1. Visi dan Misi

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian periode 2011-2014 adalah: mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian, untuk pembangunan pertanian berkelanjutan.

Untuk mencapai Visi tersebut Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengembangkan Misi sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi stake holder dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
2. Mendayagunakan lahan dan air untuk kegiatan pertanian yang berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
4. Menyusun kebijakan pengembangan perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan.
5. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana.
6. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)
7. Meningkatkan pengawasan atas penyediaan, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida
8. Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida
9. Mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pengawasan pupuk dan pestisida

10. Menyelenggarakan pengembangan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.
11. Memberikan pelayanan prima dalam bidang perencanaan, administrasi dan manajemen pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang meliputi aspek lahan dan air, pembiayaan, pupuk pestisida dan alat mesin pertanian (Alsintan), adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan suatu kebijakan, norma, standart, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana dan sarana pertanian
2. Mewujudkan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang prasarana dan sarana pertanian
3. Menyediakan lahan dan mengoptimalkan pendayagunaan lahan dan air dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
4. Mewujudkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana, serta perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha petani melalui Asuransi pertanian.
5. Mewujudkan penyediaan dan penyaluran serta pengawasan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)
6. Mewujudkan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pemanfaatan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.
7. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan lembaga dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional

8. Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
9. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas

Sasaran pelaksanaan pembangunan dan program kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kebijakan, norma, standart, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana dan sarana pertanian
2. Terwujudnya bimbingan teknis dan pengawasan di bidang prasarana dan sarana pertanian
3. Terwujudnya penyediaan lahan dan optimalisasi pendayagunaan lahan dan air dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
4. Terwujudnya sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana serta perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha petani melalui Asuransi pertanian.
5. Terwujudnya pola penyediaan dan penyaluran serta pengawasan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)
6. Terwujudnya sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pemanfaatan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.
7. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan lembaga dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional

8. Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
9. Terselenggaranya manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.

2.3. Strategi

Strategi yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Good Governance

Melaksanakan manajemen penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian yang efisien, bersih, transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang mendorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah sesuai dengan peta kewenangannya.

2. Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan Air Secara Lestari
Melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, pengendalian alih fungsi lahan, perluasan areal pertanian, optimalisasi lahan terlantar/tidur, konservasi dan rehabilitasi, reklamasi, jalan usahatani dan jalan produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dan meningkatkan kesuburan dan produktivitas melalui usahatani padi SRI, serta pengelolaan air yang efisien dan efektif dengan mengembangkan dan merehabilitasi jaringan irigasi ditingkat usahatani, jaringan irigasi desa, dan Tata Air Mikro (TAM) melalui partisipasi masyarakat.

3. Menetapkan Skala Prioritas Kawasan Pengembangan

Melaksanakan penetapan skala prioritas kawasan pengembangan pertanian yang berbasis komoditas. Perkembangan otonomi daerah yang telah dilaksanakan bisa dipandang positif, kondisi ini dapat membangun sistem pembagian manfaat ekonomi secara lebih adil dan merata antar wilayah, antar pelaku ekonomi (pengentasan kemiskinan) dan antar generasi yang dapat

memberikan dampak positif (langsung maupun tidak langsung) terhadap perbaikan ekosistem lokal maupun global. Oleh karena itu penetapan skala prioritas kawasan pengembangan pertanian berbasis komoditas perlu dikaji skala ekonominya dengan baik.

4. Mendorong Pola Partisipatif

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat/petani dalam pengelolaan lahan dan air dengan meningkatkan kemampuan SDM melalui pengarusutamaan gender (PUG) agar mandiri dan proaktif melalui kegiatan-kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dalam suatu wadah organisasi/kelompok petani yang kuat dan mandiri. Fasilitasi pemerintah harus diselenggarakan untuk mendorong kreatifitas dan memberdayakan usaha masyarakat dan memberdayakan usaha masyarakat, antara lain melalui pola Bantuan Sosial.

5. Menggalang Sinergi dan Meningkatkan Mutu Koordinasi

Melaksanakan penggalangan sinergi semua instansi terkait dalam memberdayakan potensi sumber daya pertanian yang ada untuk pengelolaan prasarana dan sarana pertanian.

6. Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM Pertanian

Pemberdayaan kelembagaan dan SDM pertanian perlu ditata dan dikelola dengan baik melalui pelatihan dan penerapan inovasi teknologi baru dibidang prasarana dan sarana pertanian.

7. Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang Feasible dan Bankable

Mendorong pemanfaatan portofolio ketersediaan dana dari bank baik melalui kredit program dan kredit komersial (KKP-E, KPEN-RP dan KUPS) untuk membiayai usaha pertanian.

8. Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang Feasible tetapi tidak Bankable
Mengoptimalkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebagian resiko kreditnya ditanggung oleh perusahaan penjamin dengan IJP dibayar oleh pemerintah.
9. Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang tidak Feasible dan tidak Bankable
Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dari Gapoktan PUAP di pedesaan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil.
10. Strategi Penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi
Mendorong penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik melalui pemberian subsidi harga pupuk dan bantuan langsung pupuk, serta bantuan sarana pengolahan pupuk organik ditingkat petani.
11. Strategi dalam meningkatkan pengawasan pupuk dan Pestisida
Mendorong peran pemerintah daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida melalui peningkatan kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
12. Strategi pelaksanaan penyediaan alat dan mesin pertanian
Melaksanakan manajemen penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian yang efisien, bersih, transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang mendorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah sesuai dengan peta kewenangannya.
13. Strategi pengembangan alat dan mesin pertanian secara selektif dan progresif
Melaksanakan pengembangan alsintan melalui optimalisasi penggunaan alsintan dan pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kualitas semua sumber daya termasuk sumber daya tenaga kerja
14. Strategi pengawasan alsintan, yaitu pemberdayaan petugas pengawas
Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penyediaan sarana pendukung

15. Strategi penumbuhan dan pengembangan UPJA dan bengkel alsintan

Pemberdayaan kelembagaan UPJA dan bengkel Alsintan melalui peningkatan kompetensi SDM, organisasi dan bisnis serta penerapan inovasi teknologi dibidang alat dan mesin pertanian.

2.4. Kebijakan

Kebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam rangka menunjang pembangunan pertanian adalah : pengembangan infrastruktur pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang di dukung pada bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian.

III. PERENCANAAN PROGRAM

3.1. Program dan Penjabaran Program ke Dalam Kegiatan

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dan/ atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kementerian/ Lembaga.

Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-I dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkupnya. Program menghasilkan outcome. Sedangkan kegiatan menghasilkan output yang mendukung pencapaian outcome program.

Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah: Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian terdapat enam kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
2. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
5. Fasilitas Pupuk dan Pestisida
6. Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan

Kegiatan-kegiatan dalam Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian diprioritaskan untuk mendanai kegiatan prioritas nasional dan prioritas Kementerian Pertanian sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah TA. 2014.

Sasaran strategis yang disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2014 adalah Meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. Pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian fokus mendukung sasaran strategis pembangunan pertanian pada pencapaian swasembada padi melalui Jumlah Penambahan Produksi Padi sebagai Indikator Kinerja Utama.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2014 maka upaya utama yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perluasan Sawah

Penambahan produksi padi diupayakan dari perluasan sawah (*carry over*) tahun 2013 seluas 39.800 Ha dan perluasan sawah tahun 2014 seluas 40.000 Ha

2. Pengembangan Optimalisasi Lahan pada komoditas padi seluas 166.130 Ha

3. Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) yang dilaksanakan oleh petani/keompok tani seluas 180.000 Ha

4. Pengembangan Jaringan Irigasi 500.000 Ha yang dimanfaatkan petani/keompok tani untuk kegiatan usahatani

5. Pemberdayaan Kelembagaan

Melalui Pengelolaan Irigasi Partisipatif sebesar 500 Unit pada lahan sawah seluas 30.000 Ha

6. Fasilitas penyaluran pupuk bersubsidi pada lahan sawah seluas 9.305.818 Ha
7. Penyaluran Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada lahan sawah seluas 40.067 Ha

IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 merupakan suatu dokumen dari yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.

Dokumen ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta dapat menyatukan operasionalisasi dari semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dalam jangka waktu satu tahun untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN**Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian****Tahun : 2014**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	Jumlah penambahan produksi padi	5.405.544 ton gkp

LAMPIRAN 5.

PENETAPAN KINERJA (PK) DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TAHUN 2014





KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangah di bawah ini :

Nama : DR. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS, DAA
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. Ir. Suswono, MMA
Jabatan : Menteri Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

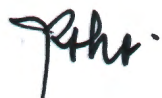
Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai format perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Suswono

Jakarta, 13 Agustus 2014
Pihak Pertama,


/ **Sumarjo Gatot Irianto**

PENETAPAN KINERJA

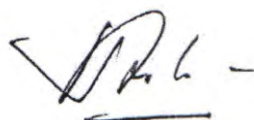
Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian
Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	Jumlah penambahan produksi padi	5.740.609 ton gkp

Jumlah Anggaran :

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Rp. 2.715.885.667.000

Menteri Pertanian,



Suswono

Jakarta, 13 Agustus 2014
Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian



Sumarjo Gatot Irianto

LAMPIRAN 6.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				Alokasi Anggaran Baseline (Milyar Rp.)				TOTAL (Milyar Rp.)
				2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA							2.978,94	3.546,31	3.100,23	2.454,24	12.079,72
	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.	Jumlah Penambahan Produksi Padi	6.237.863 Ton GKP *	7.281.530 Ton GKP *	6.435.220 Ton GKP *	5.740.609 Ton GKP					
			Meningkatnya luasan areal pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), optimasi lahan, jalan pertanian, pengembangan SRI, pra sertifikasi lahan, audit lahan luar jawa, dan MIFEE (mendukung tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan)	114.179 Ha	116.387 Ha	76.789 Ha						
				24.738 Ha	209.400 Ha	258.660 Ha						
				1.584 Km	454 Km	293 Km						
				11.400 Ha	60.000 Ha	207.000 Ha						
				76.600 Bdg	75.000 Bdg	65.000 Bdg						
				1 Pkt	8 Pkt	- 0,00						
				1 Pkt	1 Pkt	- 0,00						
			Meningkatnya efisiensi dan ketersediaan air irigasi pada lahan-lahan pertanian.	223.597 Ha	523.250 Ha	550.000 Ha						
				5.218 unit	3.100 Unit	721 Unit						
				673 Paket	300 Paket	751 Paket						
			Terfasilitasinya alat dan mesin pertanian	1.088 Unit	2.217 Unit	6.525 Unit						
			Tersalurkannya bantuan pupuk bersubsidi	9,75 jt ton	10,50 jt ton	9,25 jt ton						
				0,21 jt ton	0,10 jt ton	0,10 jt ton						
			Terfasilitasinya pola pembiayaan pertanian	8.000 Gapoktan	6.000 Gapoktan	3.500 Gapoktan						
				4,5 Triliun	4,5 Triliun	6,0 Triliun						
				50 orang	100 orang	100 orang						
				1,5 Triliun	1,8 Triliun	2,0 Triliun						
				25 LKMA	300 LKMA	50 LKMA						
				Rancangan kebijakan pembiayaan pertanian	Kebijakan pembiayaan pertanian	Kebijakan pembiayaan pertanian						
				Penyusunan kebijakan asuransi pertanian	Pengembangan dasar hukum dan uji coba	Uji coba						

*) - Indikator Kinerja Outcome Tahun 2011-2013 sudah dilaksanakan namun belum ditampilkan secara eksplisit di dalam renstra. Di dalam renstra tingkat eselon I masih menampilkan indikator output
 - Target indikator kinerja tujuan sebagaimana tercantum dalam Bab 2.3.2. Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah

